



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN  
*FLYPAPER EFFECT* TERHADAP  
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2019)**

SKRIPSI

Dibuat Oleh :

Namira

022117236

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
SEPTEMBER 2021**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN  
FLYPAPER EFFECT TERHADAP  
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2019)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CESP., QIA., CFE)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN  
FLYPAPER EFFECT TERHADAP  
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2019)**

Skripsi

Tesis disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021

Namira  
022117236

Disetujui

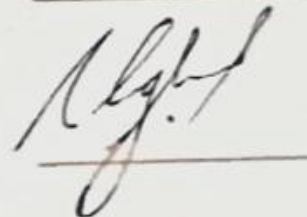
Ketua Penguji Sidang  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M, CA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak.,  
CFE., CFA., CA., QIA.)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Drs. Fdy. Ak., M.M.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Namira

NPM : 022117236

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2021

Namira

022117236

## **HAK CIPTA**

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun**

**2021**

### **Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

NAMIRA. 02117236. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019). Di bawah bimbingan: ERNADHI SUDARMANTO dan SIGIT EDY.2021.

Perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dikatakan (*fiscal opportunisme*) merupakan perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi atau kelompok. Pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan *flypaper effect* memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penyimpangan dengan berperilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran dengan tujuan untuk memberikan keuntungan sesuai dengan kebutuhan yang dapat berpotensi tidak tercapainya kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. (2) untuk menguji pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada Kabupaten di Provinsi Jawa barat tahun 2016-2019. (3) untuk menguji pengaruh *flypaper effect* pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. (4) untuk menguji pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan *flypaper effect* pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *verifikatif* metode *explanatory survey* dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2016-2019. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh, dimana mengambil mata anggaran PAD, SiLPA dan DAU serta tiga anggaran pelayanan publik untuk anggaran belanja pada sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Pengujian yang dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif, analisis data regresi linear berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi) dan uji hipotesis yang terdiri dari (uji t, uji F dan uji R<sup>2</sup>).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. *Flypaper effect* berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran dan *flypaper effect* berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran (studi kasus pada pemerintah kabupaten di provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019).

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), *Flypaper Effect* dan Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA).

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)”. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah mencurahkan cinta Kasih-Nya serta ridho-Nya yang luar biasa dan memberikan perlindungan sampai saat ini serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan proposal.
2. Kepada junjungan saya Nabi Basar Muhammad SAW beserta para Sahabat dan Keluarga-Nya yang menjadi panutan hidup saya untuk mengarungi kehidupan ini.
3. Yang paling ku sayangi kedua orangtua saya yang selalu menemani dan memberikan dukungan, semangat serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Chaidir, S.E., MM dan Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA selaku Dosen Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Bapak Sigit Edy, Drs.,Ak., M.M. selaku Dosen Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
9. Seluruh staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
10. Teruntuk teman-teman kelas E dan F, Himpunan Mahasiswa Akuntansi angkatan 2017 selama 3 tahun lebih kita selalu bersama, kelas yang penuh konflik tetapi selalu ceria, selalu semangat dan tidak pernah berhenti berjuang bersama.
11. Untuk Teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Sektor Publik 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Untuk Kekasih yang selalu memberikan motivasi Aldiyana Salam, terima kasih telah membantu, menyemangati selama proses pengerjaan skripsi ini dan selalu ada di saat masa-masa yang sulit.
13. Untuk sahabat-sahabat tercinta yaitu Gadis Aulida, Ayu Fitri Purwanti, Mita Fransiska, Erdi, Arya, Muhammad Fabiansyah, Muhammad Rivaldy. Sahabat Aib Pemuda-pemudi (Asya Cintia, Desi Imaniar, Snella Vivaldi, Nindya Najma, Andhika Putra dkk, Dwi Aprizal, Rifaldy, M. Fadhli dkk, Eggi Maulana, Taufiq Arrahman) serta sahabat Mini (Anggy Vanesya, Annis Cempaka dan Alda) yang selalu bersedia membantu, menghibur serta menjadi pendengar dan penasehat yang baik, serta menjadi penyemangat bagi penulis disaat mengalami masa-masa yang sulit. *You're The Best!*
14. Untuk Teman-teman bimbingan dan seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Program Studi Akuntansi Tahun 2017 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas semua amal baik yang sudah dilakukan selama ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwasasih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, 10 Juni 2021

Penyusun

Namira



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	iii
LEMBAR PERNYTAAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA .....	v
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.4 Indikator Akuntansi sektor Publik .....	11
2.2 Teori Keagenan.....	11
2.2.1 Pengertian Teori Keagenan .....	11
2.2.2 Teori Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik.....	13
2.2.2.1 Hubungan Keagenan Antar Eksekutif dan Legislatif.....	14

2.2.2.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Pemilih (Voters).....	15
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	15
2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.4.3 Pengukuran Pendapatan Asli daerah.....	19
2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	20
2.5.1 Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	20
2.5.2 Pengukuran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	20
2.6 <i>Flypaper Effect</i> .....	21
2.6.1 Pengertian <i>Flypaper Effect</i> .....	21
2.6.2 Pengukuran <i>Flypaper Effect</i> .....	22
2.7 Perilaku Oportunistik pada Penyusun Anggaran .....	22
2.7.1 Pengertian Oportunistik .....	22
2.7.2 Perilaku Oportunistik Legislatif dan Eksekutif.....	23
2.7.3 Pengukuran Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.....	24
2.8 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	25
2.8.1 Penelitian Sebelumnya.....	25
2.8.2 Kerangka Pemikiran.....	33
2.8.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran .....	34
2.8.2.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.....	34
2.8.2.3 Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran .....	35
2.8.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan <i>Flypapaer Effect</i> Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran .....	36
2.9 Hipotesis Penelitian .....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	39
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	40
3.5 Metode Penarikan Sampel .....	40

3.6 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	42
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	43
3.7.2 Asumsi Klasik .....	43
3.7.2.1 Uji Normalitas.....	43
3.7.2.2 Uji Multikolonieritas.....	43
3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	44
3.7.2.5 Uji Autokorelasi.....	44
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
3.7.4 Penelitian Hipotesis.....	45
3.7.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	45
3.7.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	45
3.7.4.3 Uji Simultan (Uji F) .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2 Hasil Pengumpulan Data Penelitian.....	48
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	48
4.2.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	51
4.2.3 <i>Flypaper Effect</i> Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	54
4.2.2 Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat .....	56
4.3 Analisis Data.....	59
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	59
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	60
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	60
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas .....	61
4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	62
4.3.2.4 Uji Autokorelasi.....	62
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
4.3.4 Analisis Uji Hipotesis .....	65
4.3.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
4.3.4.2 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	65

4.3.4.4 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	67
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	67
4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.....	68
4.4.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa barat Tahun 2016-2019.....	69
4.4.3 Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 .....	70
4.4.4 Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan <i>Flypaper Effect</i> Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2019.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Simpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN.....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.2 Data Populasi yang dijadikan Sampel Penelitian pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	41
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan <i>Spread</i> Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	49
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan <i>Spread</i> Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa barat Tahun 2016-2019....	51
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan <i>Spread</i> Anggaran <i>Flypaper Effect</i> Dari Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	55
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan <i>Spread</i> Anggaran Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa barat Tahun 2016-2019.....	56
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan <i>Spread</i> Anggaran Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	56
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan <i>Spread</i> Anggaran Pekerjaan umum Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa barat Tahun 2016-2019.....	58
Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S).....	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Gletser .....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi .....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji-t).....	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji-F) .....	67
Tabel 4.16 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	81
Lampiran 2	Data Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	83
Lampiran 3	Data Anggaran Belanja Sektor Pekerjaan Umum Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	85
Lampiran 4	Data Variabel Penelitian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 .....	87
Lampiran 5	Data Variabel Penelitian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 .....	89
Lampiran 6	Data Variabel Penelitian <i>Flypaper Effect</i> dari Dana Alokasi Umum Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.....	91
Lampiran 7	Data Variabel Penelitian Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.....	93

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Era reformasi yang bergulir pada 1998 berdampak pada perubahan politik dan administrasi, salah satu dari bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang desentralisasi dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk lebih bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Dengan diterapkannya Undang-Undang tersebut maka campur tangan pemerintah pusat berkurang. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar (Wilantika, 2019).

Otonomi daerah dapat diartikan, daerah tersebut diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut juga memberi penegasan bahwa Pemerintah Daerah selain memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran daerahnya sendiri, sekaligus dapat juga dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ramlan, Darwanis, dan Abdullah, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat program-program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi alat utama bagi pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban dan kebijakannya yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana konkrit dan terintegrasi (Kamaliah dkk, 2010). Dalam rencana kebutuhan yang harus diakomodir dalam APBD relatif banyak, sementara sumber daya yang tersedia relatif terbatas. Kondisi ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan penyusunan anggaran untuk memilih prioritas kebutuhan yang lebih mendesak untuk dianggarkan diantara sekian banyak kebutuhan yang ada. Namun, fakta yang saat ini terjadi APBD kerap disalahgunakan oleh para pemangku otoritas keuangan di daerah. Dugaan adanya *missallocation* dalam anggaran terjadi karena politisi memiliki kepentingan yang berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam proses penganggaran.



Keadaan ini dapat ditelaah melalui perpektif keagenan dalam proses penyusunan APBD yang merupakan tindak lanjut dari kontrak antara principal dan agent. DPRD selaku agen dari masyarakat yang telah memilih (*voters*), diberikan mandat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, agar dapat diakomodir dalam APBD. Demikian pula eksekutif selaku agen dari legislatif diharapkan mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat (Parwati dkk, 2015). Implikasi penerapan teori pada penyusunan anggaran dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, namun cenderung menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Adanya asimetri informasi antara eksekutif dengan legislatif dan legislatif dengan rakyat, hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan dalam hubungan keagenan sebab dalam interaksinya masing-masing pihak berusaha untuk mengutamakan kepentingannya.

Menurut (Wilantika, 2019) fenomena perebutan kepentingan antara para aktor kebijakan anggaran terus mengemuka, untuk mempertahankan kepentingannya dalam perebutan sumber daya yang terbatas, lembaga eksekutif akan menggunakan dalil-dalil birokratis yang prosedural, efisien dan efektif, sesuai peraturan perundangan namun disisi lainnya, sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menolak usulan eksekutif, legislatif cenderung memaksakan kehendak atau kepentingannya dengan menggunakan kekuasaannya tersebut. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi praktek broker yang dilakukan anggota legislatif untuk mencapai kepentingannya sendiri. Sesuai dengan ketentuan otonomi daerah kedudukan legislatif memiliki posisi yang lebih dominan dibanding pihak eksekutif dalam hal pengelolaan APBD, sehingga pihak eksekutif cenderung hanya sebagai pelaksana APBD dan sangat sulit melakukan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyalahgunaan sumber daya ini bisa terjadi karena agen melepaskan tanggungjawabnya tanpa sepengetahuan principal. Dan sebaliknya, principal dapat berlaku semena-mena berkaitan dengan pengalokasian sumber daya tersebut karena kekuasaan yang dimilikinya. Implikasinya, baik pihak prinsipal maupun agen dapat berperilaku oportunistik yang dapat berpotensi tidak tercapainya kebutuhan masyarakat. Perilaku oportunistik merupakan perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku untuk memenuhi segala keinginannya (Havid, 2014 dalam Megasari 2015).Maka dari itu, penyusunan anggaran menjadi faktor kunci dalam merealisasikan kewajiban serta kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut berita yang dilansir dari detik news, dipublikasi 20 Februari 2018 dengan judul ICW: Korupsi APBD oleh Kepala Daerah Terjadi Paling Banyak di 2017, Jakarta - Indonesia *Corruption Watch* (ICW) meneliti tren penindakan kasus 3 korupsi pada 2017 oleh KPK, kejaksaan, dan Polri. Hasilnya, ICW menemukan dana APBD paling banyak dikorupsi oleh kepala daerah. Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri dalam keterangannya mengatakan sepanjang 2017, 30 kepala daerah, yang terdiri atas 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati, dan 5 wali kota/wakil wali kota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar.

Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan lainnya. Dari keseluruhan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut, 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh kejaksaan, dan 8 kasus oleh kepolisian. Sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka 1.298 orang. Dibanding dengan 2016, penanganan kasus korupsi pada 2017 mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017.

Pada laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi dari koordinator divisi investigasi Indonesia *Corruption Watch* (ICW) memetakan kasus korupsi berdasarkan modus yang digunakan oleh para pelaku. Pemetaan dilakukan untuk melihat kecenderungan para pelaku dalam melakukan tindakan korupsi. Modus yang paling dominan dilakukan oleh para pelaku korupsi dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang semester 1 tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah penggelapan, ada sebanyak 47 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp233,7 miliar yang melibatkan 83 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Dan modus korupsi terbanyak kedua adalah menggelembungkan anggaran (*Mark Up*) mencapai 33 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp509 miliar. Berdasarkan sektor anggaran pelayanan publik yang terpantau dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp912 miliar dan kesehatan sebanyak 18 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp51 miliar.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemantauan diketahui lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi yaitu Pemerintah Kabupaten. Sebanyak 62 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Kabupaten di sejumlah provinsi, salah satunya pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan kasusnya terbanyak terjadi pada pemerintah desa sebanyak 53 kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp21,4 miliar. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek wilayah, pemerintah daerah kabupaten lebih luas dibandingkan pemerintahan daerah kota. Oleh sebab itu, di wilayah kabupaten masih banyak ketimpangan dalam pemerataan pembangunan, sementara untuk menjangkau pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten dibutuhkan anggaran yang lebih besar. Dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk pembangunan dalam suatu wilayah di daerah kabupaten mengalami ketimpangan dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat di tingkat Kabupaten belum berjalan secara optimal.

Beberapa contoh kasus pada daerah Kabupaten Provinsi di Jawa Barat yaitu seorang anggota Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Rizky Taufiq (33 tahun) ditahan karena diduga korupsi dana pembangunan sekolah sebanyak 31 sekolah dasar. Rizky Taufiq telah melakukan

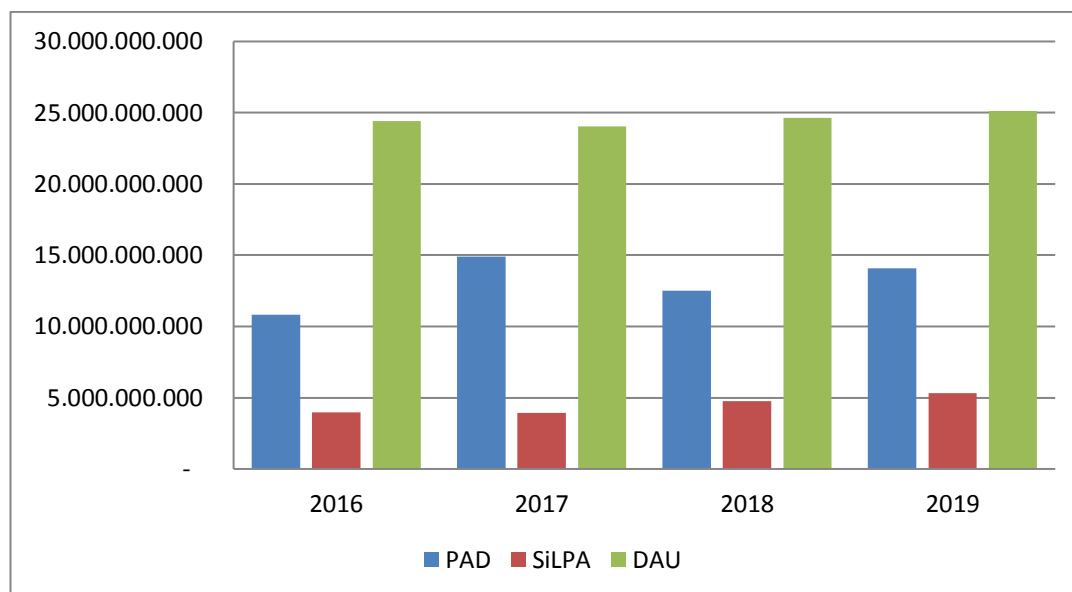
korupsi sebesar Rp1.25 miliar dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,55 miliar dari 31 sekolah yang akan dibangun. Modus yang dilakukan oleh Rizky, membuat sendiri rancangan anggaran pembangunan sekolah tanpa pengajuan dari pihak sekolah serta mengancam dinas pendidikan untuk menyetujui anggaran yang dibuatnya. (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/penmprovjabar/14/09/08/nkbm4n-korupsi-dana-pendidikan-anggota-dprd-bandungditanan>).

Contoh kasus korupsi sektor pendidikan yang ditangani oleh penegak hukum lainnya yaitu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda. Asep dituduh menggelembungkan harga pengadaan buku yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Barat tahun 2010 senilai Rp 44,6 miliar. Pada kasus ini penyidik menjerat Asep dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman kedua pasal itu mencapai 20 tahun penjara. (<https://nasional.tempo.co/read/711407/kepaladinas-pendidikan-jawa-barat-diduga-korupsi>).

Selain itu, menurut berita [pojokjabar.com](http://pojokjabar.com), tercatat bahwa terdapat perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pejabat desa yang berada di daerah Kabupaten Bogor yang berinisial ED menjadi tersangka pada tahun 2018 karena melakukan tindakan penyelewengan program rumah tidak layak huni (RTLH) dari tahun 2013 – 2016. Dalam kasus ini tercatat kerugian negara sebesar 185 juta. Selain itu menurut [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) terdapat kasus oportunistik yang dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Bogor yaitu Rachmat Yasin pada tahun 2019. Rachmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi berupatanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825 juta. Selain itu tersangka juga diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp8,93 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Berdasarkan fenomena dan kasus yang disebutkan diatas, dapat diketahui banyaknya kasus yang terjadi di tingkat daerah yang menjadi sinyalemen bagi Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan anggaran pemerintah daerah. Dalam hal ini adanya pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya yang terdiri dari dua komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Gambar 1.1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019



(Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) data diolah, 2021)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Dapat dilihat dari gambar 1.1 realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi, adanya kenaikan dan penurunan anggaran yang didapat selama 4 (empat) tahun terakhir. Adanya perubahan kenaikan dan penurunan PAD disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya PAD akan semakin tinggi. Namun hal tersebut akan mempengaruhi pada proses penganggaran, adanya peningkatan jumlah PAD akan memberi peluang bagi penyusun anggaran untuk meningkatkan pengalokasian dana yang lebih besar pada program atau kegiatan yang mendukung kepentingannya.

Dalam pengalokasian anggaran dapat menimbulkan permasalahan lain yaitu tidak diperhatikannya tempo waktu ditetapkannya perubahan APBD. Maka dari itu dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terbentuknya SiLPA yang tinggi. Dapat dilihat dari gambar 1.1 untuk anggaran SiLPA mengalami fluktuasi, adanya kenaikan besaran SiLPA pada tahun anggaran 2017 dan tahun 2019 sangat erat kaitannya dengan akibat dari tingkat serapan yang sangat kecil yang diakibatkan adanya kesalahan pola perencanaan, baik dalam hal kebijakan dan teknis. Hal tersebut akan menjadi alasan adanya perubahan APBD yang akan menjadi sarana legal untuk menganggarkan kembali (*rebudgetting*) dapat diartikan sebagai besaran tindakan oportunistik yang dilakukan dengan penggelembungan (*mark-up*) belanja

atau penurunan (*mark-down*) pendapatan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sisa anggaran, baik *output* kegiatan sudah tercapai atau belum.

Dikarenakan masih banyaknya permasalahan ketimpangan dalam proses penganggaran pada PAD dan SiLPA pada pemerintah daerah, maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dana perimbangan guna meminimalisir ketimpangan tersebut. Salah satunya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yaitu Dana Alokasi Umum. Dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menunjukkan dana tranfer berupa DAU yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya selalu meningkat dari tahun 2016-2019. Namun hal tersebut memberikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dengan adanya dana transfer yang awalnya digunakan sebagai menyeimbangkan keuangan suatu daerah, ternyata malah memicu permasalahan baru yaitu fenomena *flypaper effect* sebagai suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (Darmayanti et al, 2007 dalam Maryono, 2013).

Penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lokasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan penelitian tentang perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran sebelumnya lebih terfokus pada perilaku legislatif yang cenderung mempengaruhi alokasi anggaran untuk kepentingan politik dengan meningkatkan anggaran untuk belanja infrastruktur dan belanja DPRD. Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan APBD yang dapat menjadi sarana untuk merubah alokasi anggaran secara legal serta merupakan proses penyusunan bersama antara legislatif dan eksekutif, maka peneliti tertarik untuk meneliti perilaku oportunistik yang terjadi akibat interaksi antara kedua pihak yang di dasari adanya hubungan keagenan. Terdapat perbedaan hasil penelitian diantara para peneliti terdahulu, ini berarti terdapat variabel yang tidak konsisten. Menurut (Parwati, 2015), menyatakan bahwa PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh pada perilaku oportunistik penyusun anggaran. Sedangkan menurut (Megasari, 2015), menyatakan bahwa PAD dan *flypaper effect* tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019)“.

## **1.2 Identifikasi Masalah Dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran yaitu masih banyak adanya penyalahgunaan wewenang penyusun anggaran

yang berpotensi merugikan negara dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019?

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memperoleh data-data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, bertitik tolak dari latar belakang masalah mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* Pada Perilaku Oportunistik penyusun Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2019). Selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan pemahanan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan identifikasi masalah serta sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah berupa teori yang penulis peroleh dengan realisasi yang ada dilapangan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.
2. Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.
3. Untuk menguji pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik

Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016-2019.

4. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* secara simultan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mencakup dua hal yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah untuk selalu meningkatkan pengawasan pada proses penyusunan anggaran serta masukan agar lebih memperhatikan perilaku pihak berwenang terhadap penganggaran daerah untuk mengatasi terjadinya perilaku oportunistik penyusun anggaran.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik. Serta memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *flypaper effect* terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sumbangan pemikiran untuk lebih mengembangkan pengetahuan serta sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling berhubungan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut (Sujarweni, 2015) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu entitas atau organisasi publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak- pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan department-departemen dibawahnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme dan perlakuan akuntansi pada organisasi publik yang terdiri atas proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menjadi sebuah informasi keuangan bagi pihak – pihak terkait untuk pengambilan keputusan.

##### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo dan Syam (2012:39) menjelaskan tujuan akuntansi sektor publik adalah :

a) Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat, uang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban perhitungan.

b) Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan



pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

c) Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Tujuan akuntansi pada sektor publik oleh *American Accounting Association* (AAA) dalam Sujarweni (2015:2), yaitu :

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control*).
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

### 2.1.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Biduri 2018) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk Instansi Pemerintah. Contohnya meliputi :

- a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Lembaga dan Badan Negara seperti: KPU, KPK, dan lain-lain.
- b. Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. contohnya:

- a. Perguruan Tinggi BHMN
- b. Rumah Sakit Milik Pemerintah seperti RSCM, RS daerah
- c. Yayasan-Yayasan Milik Pemerintah

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### 3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi Nirlaba Milik Swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya :

- a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain
- b. Sekolah dan Universitas Swasta
- c. Rumah Sakit Milik Swasta

#### **2.1.4 Indikator Akuntansi Sektor Publik**

Menurut (Bastian, 2014) siklus akuntansi sektor publik antara lain :

##### 1. Transaksi

Persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.

##### 2. Analisis Bukti Transaksi

Setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

##### 3. Pencatatan Data Transaksi

Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

##### 4. Pengikhtisaran

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.

##### 5. Pelaporan

Selama periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

## **2.2 Teori Keagenan**

### **2.2.1 Pengertian Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah merupakan basis teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan yang telah dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah, teori keagenan digunakan untuk menganalisis hubungan yang terjadi antara prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran daerah. Di pemerintah daerah, prinsipal merupakan pihak legislatif contohnya (DPRD), dan agen merupakan pihak eksekutif contohnya yang ada pada pemerintah daerah yang memimpin di suatu provinsi yaitu Gubernur. Hubungan prinsipal-agen terjadi ketika tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak terhadap orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain.

Jensen and Meckling, (1976) menyatakan bahwa, “Teori Keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun secara eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Menurut (Eisenhardt, 1989) teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu :

a. Asumsi sifat manusia

Teori keagenan tentang asumsi sifat manusia menyatakan adanya sifat alamiah manusia yang memiliki sifat yang lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan dalam berpikir secara rasional (*bounded rationality*), dan sering tidak mau mengambil risiko (*risk aversion*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, prinsipal kemungkinan besar akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal ini akan menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agent memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya.

b. Asumsi keorganisasian

Teori keagenan tentang asumsi keorganisasian menyatakan bahwa setiap organisasi yang didalamnya terdapat berbagai macam karakteristik individu akan cenderung timbul konflik antar anggota organisasi.

c. Asumsi Informasi

Teori keagenan tentang asumsi informasi yang menyatakan bahwa informasi yang berharga atau dianggap penting bisa dijadikan lahan bisnis untuk meraup keuntungan (Megasari 2015). Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah akan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber dayanya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumberdaya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Proses penyusunan anggaran merupakan tindak lanjut dari kontrak antara principal dan agents. DPRD selaku agen dari masyarakat yang telah memilih (voters) diberikan mandat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan agar dapat diakomodir dalam APBD. Demikian pula eksekutif selaku agen dari legislatif diharapkan mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat. Ditinjau dari sudut pandang teori keagenan terdapat kecenderungan terjadi perilaku untuk meningkatkan alokasi sumber daya pada penetapan anggaran sektor publik yang dilakukan oleh para pelaku pada proses penganggaran (Mamer dan Johnson, 1995 dalam Abdullah dan Asmara, 2006) pengusul anggaran dalam hal ini pihak eksekutif atau agency sekaligus berperan ganda selaku pengguna anggaran. Peran ganda ini mempengaruhi perilaku pihak eksekutif untuk berupaya meningkatkan besaran angka anggaran yang diusulkan jauh diatas nilai riil yang dibutuhkan.

Dampak positif dari penerapan teori keagenan pada penyusunan anggaran akan mampu meningkatkan efisiensi karena agen ingin menunjukkan kinerja yang baik pada prinsipal, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan dampak negatif yang ditunjukkan dengan perilaku oportunistik (Latifah, 2010). Meningkatnya perilaku oportunistik dapat dilihat dari perubahan alokasi belanja daerah yang sarat dengan kepentingan pihak tertentu (Parwati dkk, 2015).

### **2.2.2 Teori Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik**

Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuan, yang berpotensi menciptakan moral *hazard* dan *adverse selection*. Principal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk memonitor kinerja agent dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien. Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran, yang justru lebih besar daripada di dunia bisnis yang memiliki *automatic checks* berupa persaingan. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Hal ini terjadi karena pihak agent memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak principal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak principal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Dalam (Muslimah, 2020) disebutkan bahwa pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 yang diantaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan

diberhentikan oleh legislatif ( UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU 32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.

2. PP No. 110 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2004 dan PP No. 37 Tahun 2005 mengatur tentang kedudukan keuangan anggota legislatif.
3. UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

### **2.2.2.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk di parlemen). Eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perpektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif. Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena pihak eksekutif (*agent*) memiliki informasi keuangan daripada pihak *prinsipal* (keunggulan informasi) sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongan sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*). Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utility (*self-interest*) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "*budgetary slack*". Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat (rakyat), bahkan boleh jadi untuk kepentingan pilkada berikutnya.

Hubungan eksekutif atau birokrasi dengan legislatif atau kongres dengan nama *self-interest* model. Dalam hal ini, legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin

memaksimumkan anggarannya, dan konstituennya ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, legislators mencari program dan projects yang membuatnya populer di mata konstituennya. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin *agency*-nya berkembang dan konstituennya percaya bahwa mereka menerima benefits dari pemerintah tanpa harus membayar biayanya secara penuh. Masalah keagenan yang timbul dikalangan legislatif (anggota dewan) terjadi dari dua tinjauan perspektif, sebagai *principal* atas eksekutif dan sebagai *agent* dengan rakyat (pemilih). Masalah keagenan yang timbul dalam perspektif *principal* akan cenderung melakukan “kontrak semu” dengan pihak eksekutif karena memiliki *discretionary power*. Dalam proses penyusunan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan “titipan” proyek atau kegiatan, hal ini terjadi untuk kepentingan pribadi secara jangka panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politis (anggota dewan) karena anggaran yang diperjuangkan adalah cenderung pada usulan yang *targetable* atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya pembangunan cenderung di daerah wilayah pemilihan politisi yang *powerful* di legislatif.

#### **2.2.2.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Pemilih (Voters)**

Hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau *preference* prinsipal atau pemilihnya. Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimumkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau instansi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah. Politisi yang terpilih bisa saja berlaku oportunistik dan karenanya voters berkeinginan menghilangkan peluang untuk mendapatkan *rents* dengan membuat politisi terikat pada suatu aturan yang menentukan apa yang dapat atau harus mereka lakukan pada kondisi tertentu. Akan tetapi, membuat aturan untuk sesuatu yang tidak jelas (*unforeseen development*) dan kompleksitas situasi yang dihadapi menyebabkan kontrak yang sempurna tidak mungkin dibuat. Politisi juga tidak akan dapat memenuhi semua janji yang dibuatnya selama kampanye pemilihan. Oleh karena itu, seperti halnya dalam bentuk hubungan keagenan yang lain, hubungan keagenan antara pemilih (voters) dengan politisi dapat dipandang sebagai *contract*.

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)**

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana

keuangan di masa mendatang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain.
  - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Setidaknya, terdapat enam sub-proses dalam penyusunan APBD, yaitu penyusunan KUA, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD, evaluasi serta penetapan Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) membuat suatu kesepakatan tentang arah kebijakan umum dan prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, Pemerintah Daerah (eksekutif) membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan arah dan kebijakan umum dan prioritas anggaran, yang kemudian akan diserahkan kepada DPRD (legislatif)

untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (eksekutif) untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi DPRD (legislatif) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif) dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

## **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD juga memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin besar PAD yang dimiliki oleh suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010:9). Mardiasmo (2011: 6) berpendapat bahwa “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”. Menurut Resmi (2011:8) “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”. Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air

b. Pajak Daerah Kabupaten

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak reklame
- 4) Pajak hiburan
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi, dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Tuntutan ganti rugi
- e) Komisi
- f) Potongan
- g) Keuntungan selisih kurs
- h) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

#### 2.4.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan otonomi daerahnya. Dalam penelitian ini cara mengukur PAD yaitu dengan menghitung spread PAD yaitu perubahan naik turunnya PAD dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Megasari, 2015).

$$\begin{aligned} \text{PAD} &= \Delta \text{PAD} \\ &= \text{PAD}_{\text{APBD}(t)} - \text{PAD}_{\text{APBD}(t-1)} \end{aligned}$$

Keterangan :

$\Delta \text{PAD}$  = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran PAD

$\text{PAD}_{\text{APBD}(t)}$  = Nilai PAD tahun berjalan

$\text{PAD}_{\text{APBD}(t-1)}$  = Nilai PAD tahun sebelumnya

## 2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

### 2.5.1 Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa lebih Perhitungan Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA merupakan suatu tolak ukur yang dapat menggambarkan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sekaligus terjadi pembiayaan Netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 menyatakan bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Abdullah, (2013) dalam Megasari, (2015) menjelaskan bahwa perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari SiLPA. Selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. SiLPA memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

### 2.5.2 Pengukuran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Dalam penelitian ini, SiLPA akan diukur dengan spread SiLPA ( $\Delta$ SiLPA) yaitu perubahan naik atau turunnya SiLPA dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Megasari, 2015).

$$\begin{aligned}\text{SiLPA} &= \Delta\text{SiLPA} \\ &= \text{SiLPA}_{\text{APBD}(t)} - \text{SiLPA}_{\text{APBD}(t-1)}\end{aligned}$$

Keterangan :

$\Delta\text{SiLPA}$  = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran SiLPA

$\text{SiLPA}_{\text{APBD}(t)}$  = Nilai SiLPA tahun berjalan

$\text{SiLPA}_{\text{APBD}(t-1)}$  = Nilai SiLPA tahun sebelumnya

## 2.6 Flypaper Effect

### 2.6.1 Pengertian Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah suatu keadaan yang terjadi dimana pemerintah daerah melaksanakan (merespon) belanja lebih banyak (lebih boros) dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD sendiri. Dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat (Wilantika 2019).

Menurut, (Gorodnichenko, 2011 dalam Mulya, 2016) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect*:

*“Flypaper Effect phenomenon can occur in two versions. Firstly, lead to the increase in local taxes and excessive of government budget spending Secondly, lead to higher elasticity of local government expenditure to transfer rather than the elasticity of local government expenditure to local text revenue. Those above studies, support the hypothesis of flypaper effect.”*

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu:

- 1) Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
- 2) Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Kemudian (Kuncoro, 2007 dalam Mulya, 2016) menjelaskan, bahwa:

“Dalam khasanah ekonomi, telah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi dua aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilustrasi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilustrasi fiskal mendasarkan kejiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap

anggaran pemerintah daerahnya”. Pemikiran birokratik berpandangan posisi lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik dimana berusaha untuk memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Model birokratik juga menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak.

Dengan demikian, dapat dikatakan *flypaper effect* adalah suatu fenomena ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya secara lebih banyak yang berasal dari transfer (*grants*) atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants dibandingkan dengan menggunakan pendapatan asli dari daerahnya tersebut, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa dampak lebih luas bahwa transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintahan daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

### 2.6.2 Pengukuran *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* adalah fenomena ekonomi ketika pemerintah daerah merespons transfer yang diberikan pemerintah pusat berupa DAU lebih besar digunakan daripada menggunakan sumber potensi kekayaan daerahnya sendiri yaitu PAD. *Flypaper Effect* ini diproksikan dengan Dana alokasi Umum (DAU) (Megasari, 2015). Cara mengukur *flypaper effect* adalah dengan menggunakan spread DAU ( $\Delta$ DAU) (Megasari, 2015).

$$\begin{aligned} \text{DAU} &= \Delta \text{DAU} \\ &= \text{DAU}_{\text{APBD}(t)} - \text{DAU}_{\text{APBD}(t-1)} \end{aligned}$$

Keterangan :

$\Delta$ DAU = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran DAU

$\text{DAU}_{\text{APBD}(t)}$  = Nilai DAU tahun berjalan

$\text{DAU}_{\text{APBD}(t-1)}$  = Nilai DAU tahun sebelumnya

## 2.7 Perilaku Oportunistik Pada Penyusun Anggaran

### 2.7.1 Pengertian Oportunistik

Istilah oportunistik berasal dari kata *opportunity* yang berarti kesempatan. Perilaku oportunistik (*oportunity behavior*) adalah sifat manusia yang memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada untuk memperoleh keuntungan demi diri sendiri maupun kelompok tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut adil atau benar. Perilaku oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun.

Perilaku oportunistik anggaran juga dapat dikatakan (*fiscal opportunisme*), yaitu perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi juga keinginan untuk aman secara fiskal, yakni anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, memiliki peluang untuk menambah alokasi saat perubahan APBD, dan kemungkinan variansi (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang rendah. Terdapat berbagai macam faktor pendukung yang memotivasi terjadinya perilaku oportunistik yaitu kemampuan dan kekuatan (Maryono dalam Havid dkk, 2014). Perilaku oportunistik akan mengarah pada tindakan-tindakan yang ilegal seperti menyembunyikan informasi dan juga menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumberdaya dalam anggaran yang telah ditetapkan. Eksekutif atau agent yang menjadi pengusul anggaran dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran tersebut berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran. Sedangkan legeslatif atau principal memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam usulan anggaran yang diajukan eksekutif. (Keefer dan Khemani, 2003 dalam Megasari, 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam penganggaran, legeslatif akan merekomendasikan eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya dan mengusulkan pengurangan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

Dapat disimpulkan perilaku oportunistik penyusun anggaran merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para penyusun anggaran yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya dalam proses penyusunan anggaran untuk kepentingannya yang dapat berpotensi tidak tercapainya kebutuhan masyarakat.

### **2.7.2 Perilaku Oportunistik Legislatif dan Eksekutif**

Perilaku oportunistik legislatif bisa terjadi pada dua posisi, yaitu sebagai prinsipal dan sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif bisa mengusulkan kebijakan yang sulit ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan fungsi legislatif dan pelayanan publik.

Sebagai agen bagi rakyat (pemilih), perilaku oportunistik legislatif terlihat lebih jelas. Dalam penganggaran, legislatif seharusnya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasi kebutuhan publik ke dalam anggaran. Usulan

kegiatan yang dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi pada saat legislatif turun ke lapangan dan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.

Terdapat dua kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasikan perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, yaitu secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan yang kedua, yaitu melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk “titipan”. Pada kondisi yang pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang akan meningkatkan penghasilannya sehingga bisa memenuhi *self-interest* dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan *political corruption* atas anggaran. Sementara pada kondisi yang kedua, *self-interest* dalam jangka panjang ingin dicapai. Usulan anggaran yang diperjuangkan yaitu yang megharumkan nama politisi di wilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya, pembangunan cenderung di daerah-daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi yang powerful di legislatif.

Eksekutif memiliki keunggulan di dalam hal penguasaan informasi dibandingkan dengan legislatif (asimetri informasi). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif merupakan pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan juga berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik mengenai birokrasi dan juga administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik yang diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan yang baik.

Eksekutif memiliki kecenderungan untuk mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya, untuk anggaran pendapatan eksekutif cenderung akan mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar saat realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung slack seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. *Slack* terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **2.7.3 Pengukuran Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

Perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan perubahan (spread) alokasi anggaran belanja tertentu dari APBD tahun (t) sebelumnya ke APBD tahun berjalan (t-1). Prinsipal dan agen berbeda preferensi ketika mengalokasikan sumber daya pada penyusunan anggaran yang menyebabkan terjadinya *spread*, sehingga nilai perilaku oportunistik menggambarkan *self-interest* penyusun anggaran (Abdullah, 2012) dalam (Megasari 2015).

Dalam penelitian ini ada dua tahap pengukuran perilaku oportunistik penyusun anggaran (OPA), yaitu (Megasari, 2015)

- a. Menghitung spread anggaran pendidikan ( $\Delta Pdk$ ), spread anggaran kesehatan ( $\Delta Kes$ ) dan spread anggaran pekerjaan umum ( $\Delta PU$ ).

$$\text{Perhitungan spread } (\Delta) = \text{APBD tahun berjalan (t)} - \text{APBD tahun sebelumnya (t-1)}$$

- b. Mengakumulasikan spread anggaran pendidikan ( $\Delta Pdk$ ), spread anggaran kesehatan ( $\Delta Kes$ ), dan spread anggaran pekerjaan umum ( $\Delta PU$ ).

$$\text{Perhitungan OPA} = \Delta Pdk + \Delta Kes + \Delta PU$$

Keterangan:

$\Delta Pdk$  : Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran pendidikan

$\Delta Kes$  : Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran kesehatan

$\Delta PU$  : Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran pekerjaan umum

## 2.8 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.8.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Ida Ayu Gede , Sutha Megasari (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Ko	Variabel Independen: • Pendapatan Asli Daerah • Selisih Lebih Perhitungan Anggaran • Flypaper Effect Variabel Dependen:	Indikator : X1 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X2 : <i>Spread</i> SiLPA (perubahan naik atau turunnya	1. PAD tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Ko ta di Bali. 2. SiLPA berpengaruh positif	Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 2 No. 2, Agustus 2015 (Ida Ayu Gede Sutha Megasari) Universitas Udayana



No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
		ta di Bali.	Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran	PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X3 : Menerima transfer dari berupa DAU. <i>Spread</i> DAU (perubahan naik atau turunnya DAU dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya.	terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Bali.  3. <i>Flypaper Effect</i> tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota di Bali.	
2.	Yahya Suahya (2017)	Peluang Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Perubahan Pada Pemerintah Kabupaten Sintang	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Selisih Lebih Perhitungan Anggaran</li> <li>• Bagi Hasil Pajak Provinsi</li> </ul> Variabel Dependen: Probabilitas perilaku oportunistik	Indikator : X1 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X2 : <i>Spread</i> SiLPA (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya	1. PAD berpengaruh positif terhadap probabilitas perilaku oportunistik penyusun anggaran perubahan pada pemerintah Kabupaten Sintang  2. SiLPA tidak	Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), Vol 5, No 3 2017. Universitas Tanjungpura.

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
			penyusun anggaran perubahan	X3 : Penerimaan pajak pada tahun berjalan	berpengaruh positif terhadap probabilita perilaku oportunistik penyusun perubahan anggaran perubahan pada pemerintah Kabupaten Sintang  3. BHPP tidak berpengaruh positif terhadap probabilita perilaku oportunistik penyusun anggaran perubahan pada pemerintah Kabupaten Sintang	
3.	Sayu Made Prawati (2015)	Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi</li> </ul>	Indikator: X1 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke	1. PAD berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Vol 10, No 2. ISSN 2303-1018.

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
			Umum • Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Variabel Dependen: Oportunistik Penyusun Anggaran	APBD tahun sebelumnya. X2 : <i>Spread</i> DAU (perubahan naik atau turunnya DAU dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya X3 : <i>Spread</i> SiLPA (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya	Anggaran di Kabupaten/Kota se-Bali. 2. DAU berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota se-Bali. 3. SiLPA berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota se-Bali.	Sayu Made Parwati (2015) Universitas Udayana Bali.
4.	Ni Kadek Ayu Suartini, Dodik Ariyanto, Maria M. Ratna Sari (2016)	Determinan Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Calon <i>Incumbent</i> Terkait Pilkada Serentak Tahun 2015.	Variabel Independen: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Perilaku Oportunistik	Indikator : X1 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X2 : <i>Spread</i> DAK (perubahan naik	1. PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran calon <i>incumbent</i> di Kabupaten/Kota se-	Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5 No. 8, 2016. ISSN: 2639-2664 (Ni Kadek Ayu Suartini, Dodik Ariyanto, Maria M.

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
			Penyusun Anggaran Calon <i>Incumbent</i>	atau turunnya DAK dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya	Indonesia 2. DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran calon <i>incumbent</i> di Kabupaten/Kota se-Indonesia	Ratna Sari) Universitas Udayana
5.	Agil Salman Mahendra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2013-2014)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</li> <li>• Flypaper Effect</li> </ul> Variabel Dependen: Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran	Indikator : X1 : <i>Spread PAD</i> (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X2 : <i>Spread SiLPA</i> (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya X3 : Menerima transfer dari berupa DAU.	1. PAD tidak berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 2. SiLPA berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Daerah	Agil Salman Mahendra (2017), Universitas Muhammadiyah Surakarta

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
				<i>Spread</i> DAU (perubahan naik atau turunnya DAU dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya).	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 3. Flypaper Effect berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	
6.	Megah Dheane Tia (2018)	Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Perubahan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Eksekutif Penyusun Anggaran (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Perubahan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran</li> </ul> Variabel Dependen: Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran	Indikator : X1 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya). X2 : <i>Spread</i> SiLPA (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya)	1. Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Eksekutif Penyusun Anggaran serta Perubahan Anggaran Pada Kabupaten/Kota di Indonesia) 2. Perubahan SiLPA	Megah Dheane Tia (2018), Universitas Lampung

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Kabupaten/Kota di Indonesia.	
7.	Yusuf Jaya Saputra (2020)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Jenis dan Letak Pemerintahan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Jenis dan Letak Pemerintahan</li> </ul> Variabel Dependen: Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran	Indikator : X1 : <i>Spread</i> DAU (perubahan naik atau turunnya DAU dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya X2 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X3 : Kelengkapan pengungkapan informasi penggunaan anggaran dikarenakan	1. DAU berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara 2. PAD berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), Vol. 5 No 1. ISSN 2052-5171 Yusuf Jaya Saputra (2019), Universitas Halu Oleo Kendari

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
				adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan antar daerah.	3. Jenis dan Letak Pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/kota Se-Sulawesi Tenggara.	
8.	Rahma Gita Muslimah dan Verawati (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> <li>• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</li> </ul> Variabel Dependen: Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran	Indikator : X1 : <i>Spread</i> PAD (perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya. X2 : <i>Spread</i> DAU (perubahan naik atau turunnya DAU dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya X3 : <i>Spread</i> DAK (perubahan naik atau turunnya	1. PAD tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan 2. DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di	Jurnal Ekonomi dan Bisnis No 1. ISSN 2655-8262 Rahma Gita Muslimah dan Verawati (2020) Universitas Universitas Bina Darma Palembang

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
				DAK dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya X4 : <i>Spread</i> SiLPA (perubahan naik atau turunnya SiLPA dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya	Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan 3. DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan 4. SiLPA tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan	

### 2.8.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Adapun kerangka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



### **2.8.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Anggaran**

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja yang tepat. Dalam hal pengalokasian berkaitan dengan sumber pembiayaannya dari pendapatan, maka besaran pendapatan akan dimanfaatkan untuk mengatur alokasi belanja. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Studi (Abdullah dan Asmara, 2006 dalam Krenn, 2017) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian perubahan PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Ia menduga power legeslatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Dari perspektif agency theory, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif dengan sepengetahuan atau persetujuan legislatif target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan *adjustment* pada saat dilakukan perubahan APBD (Tia, 2018).

Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya *missallocation* anggaran belanja pemerintah. Dalam penelitian (Fathony, 2011 dalam Suchaya, 2016) menemukan bahwa proporsi PAD yang rata-rata 10 persen dari total penerimaan daerah memiliki kecenderungan bertambah saat perubahan anggaran. Hal ini membuka peluang bagi pihak legislatif dan eksekutif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang mendukung kepentingannya yang dapat berpotensi tidak sesuai dengan dengan keinginan atau harapan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian (Parwati, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Sejalan dengan penelitian yang lainnya penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf Jaya Saputra, 2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

### **2.8.2.2 Pengaruh Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan suatu penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja serta mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penetapan belanja terjadi karena adanya penetapan pada belanja daerah yang optimis untuk mengantisipasi adanya pemotongan anggaran atau untuk mengakomodir adanya penerimaan lain yang salah satunya adalah SiLPA tahun sebelumnya. Penyusun anggaran mempunyai kecenderungan melakukan *mark-up* belanja dan *mark-down* pendapatan, sehingga efisiensi yang ditunjukkan dari besaran SiLPA hanya bersifat semu ketika output anggaran tidak tercapai. Maka dari itu adanya perubahan SiLPA menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan dan menganggarkan kembali SiLPA tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh legislatif maupun eksekutif untuk mengalokasikan kembali (*rebudgetting*) dana tersebut melalui mekanisme perubahan APBD serta memberikan peluang bagi penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik dalam mengalokasikan SiLPA tersebut untuk belanja sesuai preferensi penyusun anggaran yang membuka ruang terjadinya perilaku oportunistik.

(Mahendra, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berbeda dengan penelitian dari (Muslimah dan varawaty, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

### **2.8.2.3 Pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

*Flypaper effect* adalah menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. *Flypaper effect* dapat terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih dan memberikan keuntungan bagi para penyusun anggaran. Implikasi lain *flypaper effect* yaitu berkaitan dengan alasan politik dan birokratis, dimana transfer (*grants*) untuk pemerintah daerah cenderung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah (Mahendra, 2017). Penjelasan dari dampak ini disebutkan bahwa para birokrat berusaha untuk memaksimalkan anggaran karena dengan melakukan hal tersebut akan membuat mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di masyarakat. Hal tersebut akan berdampak dalam proses penyusunan anggaran dalam memaksimalkan anggaran sesuai kepentingannya yang dapat berpotensi tidak sesuai atau tercapainya kebutuhan masyarakat untuk berperilaku oportunistik.

Hal ini didukung oleh penelitian (Mahendra, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) menyatakan bahwa *flypaper effect* secara parsial signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Tetapi berbeda dengan penelitian (Megasari, 2015) penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota di Bali menyatakan bahwa *flypaper effect* tidak berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota di Bali.

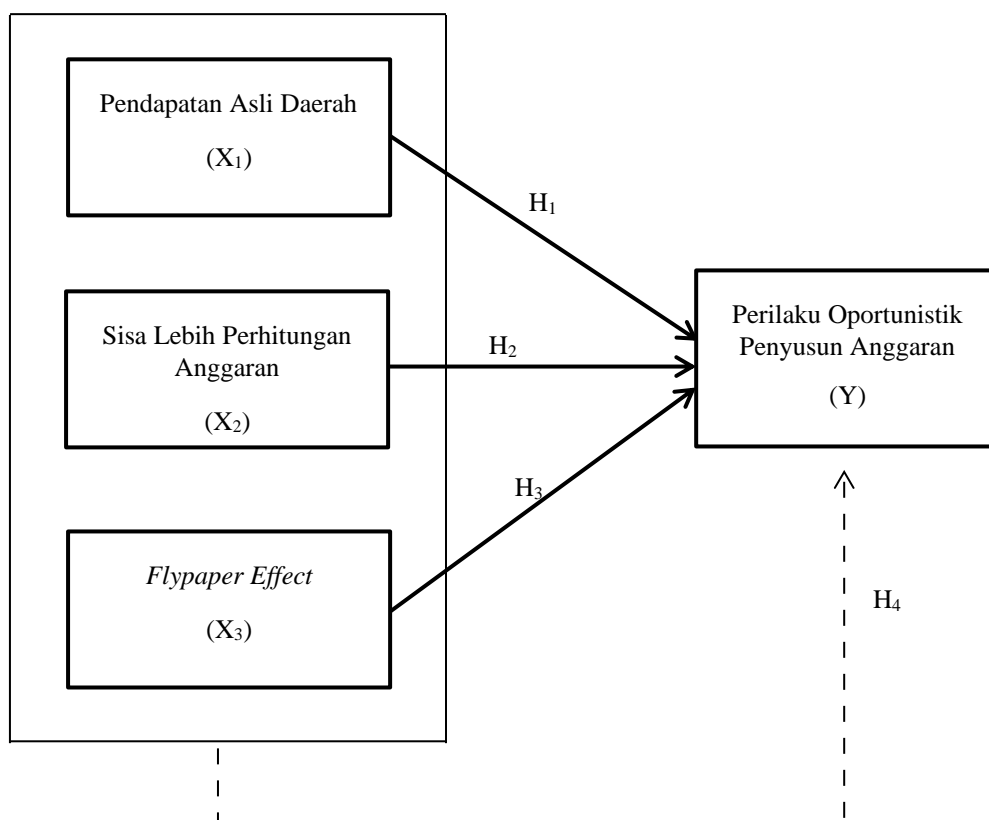
#### **2.8.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Flypaper Effect Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber ekonomi yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Daerah menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam pembiayaan dan pengeluaran untuk kebutuhan daerah tersebut. Semakin banyak PAD yang didapat, semakin daerah tersebut bisa memenuhi belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Dalam hal pengalokasian ini berkaitan dengan sumber penerimaannya dari pendapatan, tetapi besaran pendapatan asli daerah ini akan cenderung meningkat ketika adanya perubahan anggaran. Hal ini akan menjadi celah untuk mencoba mengusulkan peningkatan anggaran yang menjadi preferensi atau kebutuhan penyusun anggaran. Dalam pengalokasian anggaran, bisa menimbulkan permasalahan lain yaitu tidak diperhatikannya tempo waktu ditetapkannya perubahan APBD. Maka dari itu, dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang tinggi. Adanya SiLPA dapat dijadikan salah satu alasan adanya perubahan APBD. Oleh sebab itu, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan kembali (*rebudgetting*) dana sebelumnya melalui mekanisme perubahan APBD yang akan memberikan peluang bagi penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik pada proses pengalokasian anggaran tersebut (Ayu Suartini, 2016).

Untuk mengurangi ketimpangan dalam perilaku oportunistik, pemerintah pusat mengeluarkan Dana Alokasi Umum yang bersumber dari penerimaan lain untuk membiayai pengeluaran daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah apabila PAD rendah. Untuk itu diharapkan DAU atau dana transfer dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Namun adanya dana transfer yang awalnya digunakan sebagai menyeimbangkan keuangan suatu daerah, ternyata malah memicu

permasalahan baru yaitu fenomena *flypaper effect* yang membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri yaitu PAD (Parwati, 2015). Dari hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan (RAPBD) yang membuka ruang bagi pihak berwenang untuk memaksimalkan utilitasnya dengan merekomendasikan pengalokasian anggaran kepada kegiatan atau proyek-proyek yang menguntungkan. Dari penjelasan tersebut penelitian yang dilakukan (Wilantika, 2019) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* (Studi Pada Daerah Pemekaran Se-Sumatera Bagian Selatan) menyatakan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis harus disusun dengan metode yang sistematis yaitu melewati beberapa tahapan. Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian

setelah mengemukakan kerangka pemikiran dari landasan teori guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016-2019.
- H<sub>2</sub> : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.
- H<sub>3</sub> : *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.
- H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Flypaper Effect* secara silmultan berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis dengan suatu perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Dengan menggunakan metode penelitian *explanatory survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (2 variabel atau lebih).

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Unit analisis penelitian ini *geographic region* yaitu mengenai atau berasal dari (respons) suatu wilayah atau daerah atau negara tertentu. Yang dilakukan adalah organisasi di mana sumber data yang unit analisisnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada Lingkup Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

#### **3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Jenis data dalam penelitian ini berupa data anggaran PAD, SiLPA, dan DAU serta anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

Sumber data penelitian adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang berupa catatan maupun laporan historis yang telah tersimpan dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 – 2019 untuk anggaran Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran serta tiga anggaran belanja daerah masing-masing Kabupaten di Jawa Barat yaitu anggaran belanja pendidikan, anggaran belanja kesehatan dan anggaran belanja pekerjaan umum (infrastruktur).

### 3.4 Operasional Variabel

Operasional dibutuhkan untuk mengoperasikan variabel, sehingga menjadikan acuan dalam penggunaan instrument penelitian untuk pengelolaan data selanjutnya. Untuk mempermudah dalam proses analisis, maka peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen/Variabel Tidak Terikat/Variabel Bebas

Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang menjadi sebab atau merubah/memengaruhi variabel lain (Variabel Dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan *Flypaper Effect*.

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat/Variabel Tidak Bebas

Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (Variabel Independen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Independen/ $X_1$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAD dari APBD tahun berjalan.</li> <li>PAD dari APBD tahun sebelumnya.</li> </ul>	$\Delta PAD = PAD_{APBD(t)} - PAD_{APBD(t-1)}$  Ket: $\Delta PAD =$ Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran PAD	Rasio
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Independen/ $X_2$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>SiLPA dari APBD tahun berjalan.</li> <li>SiLPA dari APBD tahun sebelumnya .</li> </ul>	$\Delta SiLPA = SiLPA_{APBD(t)} - SiLPA_{APBD(t-1)}$  Ket: $\Delta SiLPA =$ Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran SiLPA	Rasio
<i>Flypaper Effect</i> (Independen/ $X_2$ )	Suatu kondisi ekonomi ketika pemerintah daerah merespon transfer yang diberikan	$\Delta DAU = DAU_{APBD t} - DAU_{APBD(t-1)}$  Ket:	

	pemerintah pusat berupa DAU.	$\Delta$ DAU = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran DAU	Rasio
Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Dependen/ Y)	Sikap penyusun anggaran menunjukkan atau memanfaatkan kesempatan dalam melakukan perubahan ( <i>spread</i> ) alokasi anggaran belanja tertentu dari APBD.	$OPA = \Delta Kes + \Delta Pend + \Delta PU$  Ket: $\Delta Kes$ = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran kesehatan $\Delta Pend$ = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran pendidikan $\Delta PU$ = Perubahan berkurang atau bertambahnya anggaran pekerjaan umum	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penarikan sampel yang digunakan yaitu metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang tidak diberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 18 APBD pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2016-2019. Maka diperoleh 18 kabupaten di Jawa barat yang sudah ditetapkan. Sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Populasi yang menjadi Sampel penelitian pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016-2019

No	Kode Wilayah	Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten
1.	32.04	Kabupaten Bandung	Soreang
2	32.17	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah
3	32.16	Kabupaten Bekasi	Cikarang
4	32.01	Kabupaten Bogor	Cibinong
5	32.07	Kabupaten Ciamis	Ciamis



6	32.03	Kabupaten Cianjur	Cianjur
7	32.09	Kabupaten Cirebon	Sumber
8	32.05	Kabupaten Garut	Tagorong Kidul
9	32.12	Kabupaten Indramayu	Indramayu
10	32.15	Kabupaten Karawang	Karawang
11	32.08	Kabupaten Kuningan	Kuningan
12	32.10	Kabupaten Majalengka	Majalengka
13	32.18	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
14	32.14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta
15	32.13	Kabupaten Subang	Subang
16	32.02	Kabupaten Sukabumi	Pelabuhan Ratu
17	32.11	Kabupaten Sumedang	Sumedang
18	32.06	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna

(Sumber: [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id), 2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari populasi yang dijadikan sampel yang dipilih oleh peneliti 18 kabupaten di Provinsi Jawa Barat dikarenakan pemerintah tersebut masih banyak ketimpangan dalam pemerataan pembangunan pada wilayah kabupaten dengan wilayah kabupaten lainnya.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Metode sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung di dapat dari laporan-laporan tertulis serta informasi melalui situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode pengolahan/analisis data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Pada tahap ini data mentah (*raw data*) yang telah dikumpulkan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi yang nantinya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan statistika parametrik, yaitu statistika yang menggunakan data rasio atau berdasarkan sifatnya adalah data kuantitatif dan banyak digunakan dalam analisis relasional atau hubungan antar variabel adalah analisis korelasi dan analisis regresi.

Metode analisis penelitian ini menggunakan *Software Statistic SPSS 25* yang merupakan sebuah program untuk pengelolaan data dan pengujian hipotesis yang berguna dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah

dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) dari data sampel. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran distribusi dan perilaku data sampel penelitian tersebut. Analisis deskriptif ini menunjukkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data variabel dependen berupa perilaku oportunistik penyusun anggaran, serta variabel independen berupa PAD, SiLPA dan *Flypaper Effect*.

### 3.7.2 Asumsi Klasik

Model analisis regresi linier berganda dapat dijadikan sebagai alat estimasi jika asumsi model regresi berganda tersebut merupakan model regresi yang dihasilkan estimator linier yang tidak bias (*Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*), yaitu data yang terdistribusi dengan normal, tidak terdapat multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah persyaratan *BLUE* ini terpenuhi atau tidak dapat diuji maka terlebih dahulu perlu dilakukan satu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016) menyatakan bahwa “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi pada variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak”. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang di analisis. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini, yaitu dengan Uji Kolmogorov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal.
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka distribusi data normal

#### 3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independennya. Multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai *variance inflation factor* (VIF) diatas 10, maka terjadi multikolinieritas, sedangkan jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan lawannya *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016).

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari penelitian ini adalah uji menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas akan dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu Uji Glesjer, Uji Scatterplots regresi dan Uji Koefisien Korelasi Spearman's rho. Uji Heteroskedastisitas dengan metode glesjer dapat dilihat pada tabel *Correlations*. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai  $\text{Sig} > 0.05$ . Menurut Ghozali (2016) dasar analisis dari uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

1. Jika terjadi pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (misalnya bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, juga titik-titik menyebar di atas di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedestisitas.

### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah korelasi (Ghozali, 2016). Cara mendeteksi adanya autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin-Watson (DW test) dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negative. Menurut Ghozali (2016) keputusan mengenai keberadaan autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antar batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari pada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antar batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan atau mengukur besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependendan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 .X_1+ \beta_2 .X_2+ \beta_3 .X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah  
 $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah  
 $\beta_2$  = Koefisien regresi untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
 $X_2$  = Selisih Lebih Perhitungan Anggaran  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi untuk *Flypaper Effect*  
 $X_3$  = *Flypaper Effect*  
 $e$  = *Error of estimation*

### 3.7.4 Pengujian Hipotesis

Penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap suatu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi (masalah atau pertanyaan penelitian) dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti.

#### 3.7.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu atau ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

#### 3.7.4.2 Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji Ststistik t dapat digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau sig.  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.

2. Jika  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $\text{sig.} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak . Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen bila dilakukan uji secara parsial.

#### **3.7.4.3 Uji Simultan (Uji F)**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Kriteria pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika  $F$  hitung  $> F$  tabel atau  $\text{sig.} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika  $F$  hitung  $< F$  tabel atau  $\text{sig.} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak . Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk sejak masa kolonial Belanda tahun 1925, namun demikian sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 4 Juli 1950, saat ditetapkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Pusat pemerintahannya berada di Bandung dan memiliki luas 35.377,76 kilometer persegi atau sekitar 1,85 persen dari luas daratan Indonesia. Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam provinsi terluas kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur (47.921 km<sup>2</sup>). Populasi penduduknya mencapai 49,93 juta jiwa dan terbanyak di Indonesia.

Provinsi Jawa Barat secara geografis berada dibagian Utara Indonesia, terletak pada garis di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Wilayah Jawa barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Dengan luas wilayah administrasi adalah sebesar 37.851.11 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 35.377,76 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,85 persen dari luas daratan Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks. Secara administratif, Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta
- b. Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah
- c. Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.

Secara administratif pemerintahan wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten, Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar

Pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu pemerintah daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten yang berada di Jawa Barat memiliki luas wilayah yang lebih luas dari pemerintah Kota di Jawa Barat. Penduduk Kabupaten di Jawa Barat mayoritas bermata pencaharian berada pada sektor agraris atau pertanian, maka dari itu Kabupaten di Jawa Barat dalam pelaksanaan anggarannya memiliki prioritas dalam pembangunan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 4.2 Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut. Pertama adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect*, kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2019. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *geografic region* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respons dari suatu wilayah atau daerah. Dalam hal ini unit analisisnya adalah 18 daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan 2019 menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing daerah Kabupaten di Provinsi Jawa barat Tahun 2016-2019.

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang tidak diberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah data yang dikumpulkan dan digunakan sebanyak 54 data. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran sebagai berikut:

### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pilar untuk mengukur sejauh mana kemandirian suatu daerah (Megasari 2015). Pendapatan Asli Daerah benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Tuntutan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, seperti totalnya yang begitu kecil dalam penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah.

Dalam penelitian ini memakai indikator Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menghitung *spread* PAD yaitu perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya (Megasari 2015).

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan *Spread* Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.

No	Kabupaten	Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	749.693.809.854	-247.211.707.753	366.505.175.346
2.	Kab. Sukabumi	250.563.609.092	-234.130.768.751	54.419.525.973
3.	Kab. Cianjur	80.076.036.011	34.612.063.404	58.714.171.288
4.	Kab. Bandung	80.391.128.857	-9.362.409.548	97.810.931.225
5.	Kab. Garut	306.942.922.650	-270.956.340.548	65.266.302.195
6.	Kab. Tasikmalaya	185.275.022.867	-153.081.630.637	39.870.307.567
7.	Kab. Ciamis	18.316.199.200	11.534.650.306	29.669.698.049
8.	Kab. Kuningan	130.957.035.463	-81.180.378.485	-1.814.138.176
9.	Kab. Cirebon	250.287.704.026	-194.527.008.796	55.030.497.877
10.	Kab. Majalengka	182.256.529.284	-63.809.712.133	-10.130.865.294
11.	Kab. Sumedang	207.452.430.813	121.075.399.378	31.346.515.903
12.	Kab. Indramayu	226.417.462.551	-157.701.563.956	30.170.441.009
13.	Kab. Subang	220.660.832.211	-180.527.619.547	62.555.407.754
14.	Kab. Purwakarta	131.364.417.109	-103.629.508.384	51.502.680.908
15.	Kab. Karawang	394.918.391.018	-228.740.701.920	186.750.621.714
16.	Kab. Bekasi	393.990.940.410	-217.436.506.556	344.999.215.719
17.	Kab. Bandung Barat	233.695.238.546	-187.575.361.263	105.746.006.726
18.	Kab. Pangandaran	17.205.953.935	27.625.818.057	3.595.915.064

(Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui dengan perhitungan menggunakan *spread* anggaran, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 menunjukkan mengalami perubahan kenaikan dan penurunan anggaran yang didapatkan setiap tahunnya. Dalam hal ini terlihat dari anggaran pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan yaitu Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp749.693.809.854 dan tahun 2019 sebesar Rp366.505.175.346, Kabupaten Sukabumi untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp250.563.609.092 dan tahun 2019 sebesar Rp54.419.525.973, Kabupaten Cianjur untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp80.076.036.011, tahun berjalan 2018 sebesar Rp34.612.063.404, dan tahun 2019 sebesar Rp58.714.171.288, Kabupaten Bandung untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp80.391.128.857, tahun



2019 sebesar Rp97.810.931.225, Kabupaten Garut untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp306.942.922.650 dan tahun berjalan 2019 sebesar 65.266.302.195, Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp185.275.022.867 dan tahun 2019 39.870.307.567, Kabupaten Ciamis untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp18.316.199.200, tahun berjalan 2018 sebesar Rp11.534.650.306 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp29.669.698.049 , Kabupaten Kuningan untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp130.957.035.463, Kabupaten Cirebon untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp250.287.704.026 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp55.030.497.877, Kabupaten Majalengka untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp182.256.529.284, Kabupaten Sumedang untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp207.452.430.813, tahun berjalan 2018 sebesar 121.075.399.378 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp31.346.515.903, Kabupaten Indramayu untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp226.417.462.551 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp30.170.441.009, Kabupaten Subang untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar 220.660.832.211 dan tahun berjalan 2019 sebesar 62.555.407.754, Kabupaten Purwakarta untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar 131.364.417.109 dan tahun berjalan 2019 sebesar 51.502.680.908, Kabupaten Karawang untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp394.918.391.018 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp186.750.621.714, Kabupaten Bekasi untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp393.990.940.410 dan tahun berjalan Rp344.999.215.719, Kabupaten Bandung Barat untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp233.695.238.546 dan tahun berjalan 2019 sebesar 105.746.006.726, Kabupaten Pangandaran untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp17.205.953.935, tahun berjalan 2018 sebesar Rp27.625.818.057 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp3.595.915.064.

Setelah itu, Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan anggaran pada Kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor untuk tahun berjalan 2018 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp-247.211.707.753, Kabupaten Sukabumi untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-234.130.768.751, Kabupaten Bandung untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-9.362.409.548, Kabupaten Garut untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-270.956.340.548, Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-153.081.630.637, Kabupaten Kuningan untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-81.180.378.485 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp-1.814.138.176, Kabupaten Cirebon untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-194.527.008.796, Kabupaten Majalengka untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-63.809.712.133 dan tahun berjalan 2019 sebesar Rp-10.130.865.294, Kabupaten Indramayu untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-157.701.563.956, Kabupaten Subang untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-180.527.619.547, Kabupaten

Purwakarta untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-103.629.508.384, Kabupaten Karawang untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-228.740.701.920, Kabupaten Bekasi untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-217.436.506.556, Kabupaten Bandung Barat untuk tahun berjalan 2018 sebesar Rp-187.575.361.263.

Dari penjelasan *spread* anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 di atas, dapat dikatakan adanya perubahan kenaikan atau turunnya Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah. Tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah adalah indikator yang paling utama.

#### 4.2.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat

Sisa lebih Perhitungan Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pasal 137 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Dalam penelitian ini memakai indikator SiLPA dapat diukur dengan menghitung *spread* SiLPA yaitu perubahan naik atau turunnya SiLPA dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya (Megasari 2015).

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan *Spread* Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019

No	Kabupaten	Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	-7.617.905.062	179.166.255.053	240.931.656.029
2.	Kab. Sukabumi	102.731.967.081	8.000.040.000	-121.381.318.840
3.	Kab. Cianjur	99.148.447.837	10.146.205.421	77.613.960.569
4.	Kab. Bandung	160.349.673.810	61.019.118.399	-72.502.372.683
5.	Kab. Garut	42.564.938.870	34.825.185.152	119.238.520.720

6.	Kab. Tasikmalaya	-104.205.457.236	91.512.763.375	37.171.084.564
7.	Kab. Ciamis	86.626.357.540	-95.827.675.372	238.586.143.146
8.	Kab. Kuningan	38.665.773.098	-12.887.340.987	20.180.503.203
9.	Kab. Cirebon	-21.404.623.845	261.410.385.073	-11.223.656.297
10.	Kab. Majalengka	44.624.501.728	-4.846.243.563	-57.693.970.069
11.	Kab. Sumedang	-84.901.966.684	-194.638.568.548	3.571.554.353
12.	Kab. Indramayu	-133.577.694.427	-8.606.327.350	65.792.380.515
13.	Kab. Subang	36.250.711.812	-39.959.746.977	16.984.329.156
14.	Kab. Purwakarta	-99.185.475.489	28.102.771.383	-116.635.527.361
15.	Kab. Karawang	(4.534.889.686)	-141.731.357.897	17.416.490.860
16.	Kab. Bekasi	-281.214.502.155	722.686.796.304	124.958.209.839
17.	Kab. Bandung Barat	136.793.838.051	-31.939.644.337	-38.151.525.333
18.	Kab. Pangandaran	-42.067.097.131	-25.142.822.038	12.232.651.609

(Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui dengan perhitungan menggunakan *spread* anggaran, sisa lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran yang didapat dari penerimaan daerah dan bersumber dari sisa kas anggaran sebelumnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 mengalami perubahan sisa lebih anggaran di setiap tahunnya dari tahun sebelumnya untuk tahun berjalan. Dalam hal ini terlihat dari sisa lebih perhitungan yang mengalami perubahan kenaikan dari tahun sebelumnya untuk tahun berjalan berikutnya yaitu Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun berjalan 2018 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2017 sebesar Rp179.166.255.053 dan tahun 2019 dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp240.931.656.029, Kabupaten Sukabumi untuk tahun berjalan 2017 mengalami kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp102.731.967.081 dan tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran 2017 sebesar Rp8.000.040.000, Kabupaten Cianjur untuk tahun berjalan 2017 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp99.148.447.837, tahun 2018 dari tahun anggaran 2017 sebesar Rp10.146.205.421 dan tahun 2019 dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp77.613.960.569, Kabupaten Bandung untuk tahun berjalan 2017 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran sebesar Rp160.349.673.810 dan tahun 2018 sebesar Rp61.019.118.399, Kabupaten Garut untuk tahun berjalan 2017 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran sebesar Rp42.564.938.870, tahun 2018 sebesar Rp34.825.185.152 dan tahun 2019 sebesar Rp119.238.520.720, Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun berjalan 2018 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp91.512.763.375 dan tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran 2018 sebesar

Rp37.171.084.564, Kabupaten Ciamis mengalami perubahan sisa anggaran untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp86.626.357.540 dan tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp238.586.143.146, Kabupaten Kuningan untuk tahun berjalan 2017 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp38.665.773.098 dan tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp20.180.503.203, Kabupaten Cirebon untuk tahun berjalan 2018 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2017 sebesar Rp261.410.385.073, Kabupaten Majalengka untuk tahun berjalan 2017 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp44.624.501.728, Kabupaten Sumedang untuk tahun berjalan 2019 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun sebelumnya 2018 sebesar Rp3.571.554.353, Kabupaten Indramayu untuk tahun berjalan 2019 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp65.792.380.515, Kabupaten Subang untuk tahun berjalan 2017 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp36.250.711.812 dan tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp16.984.329.156, Kabupaten Purwakarta untuk tahun berjalan 2018 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp28.102.771.383, Kabupaten Karawang untuk tahun berjalan 2019 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp17.416.490.860, Kabupaten Bekasi untuk tahun berjalan 2018 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp722.686.796.304 dan tahun berjalan 2019 dari tahun sebelumnya 2018 sebesar Rp124.958.209.839, Kabupaten Pangandaran untuk tahun berjalan 2019 mengalami perubahan kenaikan sisa anggaran dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp12.232.651.609.

Setelah itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang mengalami perubahan penurunan sisa anggaran dari tahun sebelumnya pada 18 Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat di 18 Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-7.617.905.062, Kabupaten Sukabumi untuk tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp-121.381.318.840, Kabupaten Bandung untuk tahun berjalan 2019 dari tahun sebelumnya 2018 sebesar Rp-72.502.372.683, Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun berjalan 2017 dari tahun sebelumnya 2016 sebesar Rp-104.205.457.236, Kabupaten Ciamis untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya 2017 sebesar Rp-95.827.675.372, Kabupaten Kuningan untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya 2017 sebesar Rp-12.887.340.987, Kabupaten Cirebon untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-21.404.623.845 dan untuk tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp-11.223.656.297, Kabupaten Majalengka untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya 2017 sebesar Rp-4.846.243.563 dan

untuk tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran sebelumnya 2018 sebesar Rp-57.693.970.069, Kabupaten Sumedang untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-84.901.966.684 dan tahun berjalan 2018 dari tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp-194.638.568.548, Kabupaten Indramayu untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-133.577.694.427 dan tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya 2017 sebesar Rp-8.606.327.350, Kabupaten Subang untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp-39.959.746.977, Kabupaten Purwakarta untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-99.185.475.489 dan untuk tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp-116.635.527.361, Kabupaten Karawang untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-4.534.889.686 dan untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp-141.731.357.897, Kabupaten Bekasi untuk tahun berjalan 2017 dari tahun sebelumnya 2016 sebesar Rp-281.214.502.155, Kabupaten Bandung Barat untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp-31.939.644.337 dan untuk tahun berjalan 2019 dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp38.151.525.333 dan Kabupaten Pangandaran untuk tahun berjalan 2017 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-42.067.097.131 dan untuk tahun berjalan 2018 dari tahun anggaran sebelumnya 2016 sebesar Rp-25.142.822.038.

Dari penjelasan diatas, adanya perubahan kenaikan atau penurunan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan tersebut biasanya terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari SiLPA. Selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan laporan realisasi anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain yang timbul dalam pengalokasian anggaran adalah sebab tidak diperhatikannya tempo waktu ditetapkannya perubahan APBD tersebut yang akan menjadikan anggaran tidak efektif bahkan tidak terealisasi sesuai dengan tujuan awal pada proses perancangan atau penyusunan anggaran.

#### **4.2.3 *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat**

*Flypaper Effect* adalah suatu keadaan yang terjadi dimana pemerintah daerah melaksanakan (merespon) belanja lebih banyak (lebih boros) dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi

Umum (DAU) dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD sendiri. Dalam penelitian ini memakai indikator Dana Alokasi Umum dapat diukur dengan menghitung *spread* DAU yaitu perubahan naik atau turunnya DAU dari APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya (Megasari, 2015).

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan *Spread* Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

No	Kabupaten	Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	-15.776.059.000	17.019.352.000	115.829.894.000
2.	Kab. Sukabumi	-20.349.795.000	5.004.455.000	73.929.180.000
3.	Kab. Cianjur	-27.126.287.000	5.555.590.000	78.644.145.000
4.	Kab. Bandung	-36.834.775.000	357.472.000	89.614.410.000
5.	Kab. Garut	-31.773.345.000	30.000.000.000	30.113.781.000
6.	Kab. Tasikmalaya	-25.785.032.000	9.062.095.000	57.077.905.000
7.	Kab. Ciamis	-21.144.956.000	-25.718.531.588	55.977.333.779
8.	Kab. Kuningan	-21.406.917.000	3.000.000.000	43.164.244.000
9.	Kab. Cirebon	-26.734.487.000	5.396.063.000	90.752.944.000
10.	Kab. Majalengka	21.535.698.000	-34.124.586.640	-2.905.577.460
11.	Kab. Sumedang	-19.731.396.000	6.599.806.000	55.030.042.000
12.	Kab. Indramayu	-24.485.788.000	2.387.209.000	46.257.446.000
13.	Kab. Subang	-22.936.638.000	-173.962.375	41.124.943.375
14.	Kab. Purwakarta	-7.289.330.000	4.142.519.000	35.327.792.000
15.	Kab. Karawang	-10.989.980.000	67.185.450.000	9.105.332.000
16.	Kab. Bekasi	-20.616.719.000	501.063.073.000	-434.405.367.000
17.	Kab. Bandung Barat	-19.731.396.000	6.599.806.000	55.030.042.000
18.	Kab. Pangandaran	-25.848.932.000	-530.301.000	29.670.171.000

(Sumber data: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah 2021)

Dari hasil pengamatan diatas berdasarkan tabel 4.3, perhitungan dengan menggunakan *spread* anggaran Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 di atas, dapat dikatakan adanya perubahan anggaran kenaikan dan turunnya anggaran pada DAU. Dana Alokasi Umum merupakan pemberian dana bantuan (*transfer*) yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dana tersebut berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Daerah yang mempunyai PAD kecil akan mendapatkan

DAU yang besar, dan begitu sebaliknya daerah yang mempunyai PAD yang besar, maka akan mendapatkan DAU yang kecil. Besar-kecilnya anggaran DAU yang diterima dari pemerintah pusat sangat mempengaruhi kinerja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) apabila dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah digunakan lebih besar daripada penerimaan dari daerah tersebut, maka akan terjadi fenomena *flypaper effect*. Fenomena ini mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Terjadinya *Flypaper Effect* dalam beberapa kajian dikelompokkan dalam 2 (dua) aliran pemikiran yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *Flypaper Effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya. Dalam birokrat pemerintah daerah dan masyarakat memandang bahwa kemudahan transfer yang diterima pada saat yang sedang berjalan tetap memiliki nilai sekarang (*present value*) yang lebih tinggi daripada jumlah transfer yang diterima pada waktu-waktu yang akan datang meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi.

#### 4.2.4 Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Perilaku oportunistik anggaran juga dapat dikatakan (*fiscal opportunism*), yaitu sikap manusia dalam pembuatan keputusan alokasi belanja untuk mencoba merubah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan juga keinginan untuk aman secara fiskal, yakni anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, memiliki peluang untuk menambah alokasi saat perubahan APBD, dan kemungkinan variansi (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang rendah.

Perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan perubahan (*spread*) alokasi anggaran belanja tertentu dari APBD tahun (t) sebelumnya ke APBD tahun berjalan (t-1). Prinsipal dan agen berbeda preferensi ketika mengalokasikan sumber daya pada penyusunan anggaran yang menyebabkan terjadinya *spread*, sehingga nilai perilaku oportunistik menggambarkan *self-interest* penyusun anggaran (Megasari 2015).

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan *Spread* Anggaran Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

No	Kabupaten	Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	296.429.810.161	175.894.352.284	78.517.868.619
2.	Kab. Sukabumi	129.708.770.581	28.058.935.740	19.596.421.540
3.	Kab. Cianjur	141.057.024.558	75.501.441.054	-135.236.712.051
4.	Kab. Bandung	78.023.998.111	-28.902.109.102	57.474.573.295

5.	Kab. Garut	328.060.948.728	-131.338.272.591	81.822.274.577
6.	Kab. Tasikmalaya	79.635.982.289	141.724.458.550	104.829.250.815
7.	Kab. Ciamis	29.533.573.087	19.091.976.326	29.010.652.074
8.	Kab. Kuningan	27.670.796.533	10.075.867.434	99.065.887.594
9.	Kab. Cirebon	101.584.144.943	-42.738.221.992)	140.170.553.462
10.	Kab. Majalengka	-768.213.591.285	277.881.913.018	140.263.089.065
11.	Kab. Sumedang	-17.454.586.835	131.095.967.137	149.811.231.996
12.	Kab. Indramayu	3.972.038.674	-56.963.098.727	80.210.258.327
13.	Kab. Subang	1.069.899.573.921	-170.153.382.841	126.834.935.978
14.	Kab. Purwakarta	-525.457.532.174	611.544.935.747	52.543.110.075
15.	Kab. Karawang	107.487.595.970	23.946.716.248	117.643.476.271
16.	Kab. Bekasi	814.411.653.683	-29.777.913.337	-36.752.984.031
17.	Kab. Bandung Barat	111.984.147.308	-71.137.556.373	102.146.925.181
18.	Kab. Pangandaran	174.357.864.986	-152.775.774.334	26.619.339.974

(Sumber data: [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), data diolah 2021)

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan *Spread* Anggaran Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

No	Kabupaten	Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	119.680.786.891	1.570.401.516	198.735.592.555
2.	Kab. Sukabumi	-106.633.768.268	75.910.454.087	45.736.189.681
3.	Kab. Cianjur	-8.869.532.104	63.786.859.467	48.832.370.776
4.	Kab. Bandung	-10.490.298.209	22.324.148.202	220.218.573.596
5.	Kab. Garut	-65.032.520.139	7.602.451.660	141.701.147.524
6.	Kab. Tasikmalaya	-42.417.988.895	3.586.635.873	103.456.096.635
7.	Kab. Ciamis	23.448.817.130	32.945.597.386	12.228.281.756
8.	Kab. Kuningan	44.276.579.462	7.658.560.126	32.101.791.523
9.	Kab. Cirebon	18.946.759.198	69.166.183.302	124.068.965.991
10.	Kab. Majalengka	-136.291.101.706	133.390.714.787	4.800.827.538
11.	Kab. Sumedang	80.737.618.834	38.737.141.821	7.918.301.670
12.	Kab. Indramayu	81.750.262.094	94.091.753.713	12.592.132.160
13.	Kab. Subang	373.852.322.017	-63.244.586.014)	133.997.906.132
14.	Kab. Purwakarta	-190.970.824.269)	246.759.074.591	55.477.161.365



15.	Kab. Karawang	17.495.786.902	82.453.836.907	126.979.489.332
16.	Kab. Bekasi	88.827.609.041	145.581.170.410	34.825.330.683
17.	Kab. Bandung Barat	59.763.382.914	-59.365.042.003	44.866.697.186
18.	Kab. Pangandaran	82.429.357.394	14.088.553.190	178.404.176.509

(Sumber data: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah 2021)

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan *spread* Anggaran Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

No	Kabupaten	Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	149.882.024.169	269.151.305.782	-135.248.089.650
2.	Kab. Sukabumi	174.495.078.471	78.907.643.928	138.987.547.649
3.	Kab. Cianjur	24.584.101.807	87.434.595.268	70.555.952.865
4.	Kab. Bandung	73.102.247.245	74.417.821.410	215.400.742.971
5.	Kab. Garut	299.472.143.097	158.542.215.945	90.118.775.290
6.	Kab. Tasikmalaya	124.650.400.454	-32.904.003.246	105.900.166.143
7.	Kab. Ciamis	111.937.667.366	-8.481.887.822	-9.589.962.493
8.	Kab. Kuningan	36.407.450.536	-8.140.129.905	46.976.036.774
9.	Kab. Cirebon	128.254.446.288	71.471.907.452	104.882.984.536
10.	Kab. Majalengka	408.971.357.801	96.806.086.396	1.155.789.080.789
11.	Kab. Sumedang	135.997.895.386	14.167.352.581	78.279.847.168
12.	Kab. Indramayu	146.707.627.374	38.595.073.826	171.565.544.971
13.	Kab. Subang	1.199.886.780.523	-188.347.488.800	218.266.607.185
14.	Kab. Purwakarta	-519.148.145.847	591.002.650.133	121.249.101.253
15.	Kab. Karawang	95.364.370.772	107.505.594.287	214.443.309.190
16.	Kab. Bekasi	-637.879.658.050	52.197.003.627	89.487.245.663
17.	Kab. Bandung Barat	139.910.850.703	123.169.401.760	64.768.181.246
18.	Kab. Pangandaran	313.888.474.872	-254.783.506.648	47.644.170.616

(Sumber data: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah 2021)

Dari hasil pengamatan diatas berdasarkan tabel 4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6 dapat dikatakan dengan perhitungan menggunakan *spread* anggaran di setiap pencapaian anggaran dari APBD untuk anggaran pelayanan publik seperti anggaran belanja pendidikan, anggaran belanja kesehatan dan anggaran belanja pekerjaan umum (infrastruktur) menunjukkan mengalami perubahan kenaikan dan penurunan anggarannya pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, adanya perubahan tersebut terjadi karena dalam proses penyusunan anggaran didalam perubahan APBD yang

ditetapkan di penghujung tahun anggaran, hal tersebut dapat berpotensi tidak tercapainya target yang ditetapkan terutama pada belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Pemerintah Daerah (esekutif) dan DPRD (legislatif) membuat suatu kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didalam proses penyusunan anggarannya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan pejabat eksekutif akan lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar dalam penyusunan APBD. Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki asimetri informasi keuangan pemerintah daerah dibanding pejabat legislatif dengan memberikan acuan kebijakan dan prioritas anggaran sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan, akan mejadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik.

### **4.3 Analisis Data**

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan pengujian statistik yaitu *Software Statistic Product and Service Solution (SPSS) vertion 25*. Maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut.

#### **4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Adapun hasil dari pengujian analisis deskriptif dari variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	54	-748,26	978,11	129,9113	297,54865
SiLPA	54	-950,00	866,26	23,7926	432,75830
Flypaper Effect	54	-434,41	907,53	132,5559	337,51160
OPA	54	-99,58	493,09	156,3622	133,43766
Valid N (listwise)	54				

(Sumber : Output SPSS 25, Data sekunder, diolah 2021)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 sampel dan jangka waktu pengambilan sampel dengan menggunakan perhitungan *spread* anggaran selama 3 tahun maka  $N=54$ . Selain itu, dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai minimum sebesar -748,26, nilai maksimum sebesar 978,11, *mean* sebesar 129,9113, dan *standart deviation* sebesar 297,54865. Variabel Sisa lebih Perhitungan Anggaran (X2) memiliki nilai minimum sebesar -950,00, nilai maksimum sebesar -866,26, *mean* sebesar 23,7926, dan *standart deviation* sebesar 432,75830. Variabel *Flypaper Effect* (X3) memiliki nilai minimum sebesar -434,41, nilai maksimum sebesar 907,53 *mean* sebesar 132,5559, dan *standart deviation* sebesar 337,51160. Variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran (Y) memiliki nilai minimum sebesar -99,58, nilai maksimum sebesar 493,09, *mean* sebesar 156,3622, dan *standart deviation* sebesar 133,43766.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (*best Linier unbiased Estimator*). Untuk itu diperlukan beberapa pengujian data diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas untuk data dilakukan dengan uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji *one sample kolmogrov smirnov*, apabila  $Sig > 0,05$  maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila  $Sig < 0,05$  maka data tidak berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	103,46421424
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,047
Test Statistic		,118
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: Output SPSS 25 data diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan data Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai signifikasikan atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh adalah 0,59 melebihi 0,05. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,059$ . Karena nilai probabilitas (0,59) lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**4.3.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance*  $< 0,1$  dan nilai *variance inflation factor (VIF)*  $> 10$ , maka terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	98,652	15,609		6,320	,000		
	PAD	,223	,046	,491	4,825	,000	,969	1,031
	SiLPA	,028	,033	,086	,851	,398	,978	1,022
	Flypaper Effect	,157	,043	,365	3,617	,001	,986	1,014

a. Dependent Variable: OPA

(Sumber: Output SPSS 25, data sekunder diolah, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.9, diatas pada kolom VIF dapat diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel yaitu PAD ( $X_1$ ) sebesar 1,031, SiLPA ( $X_2$ ) sebesar 1,022 dan *Flypaper Effect* ( $X_3$ ) sebesar 1,014. Artinya, bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Dan *tolerance* yang diperoleh masing-masing variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,969, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( $X_2$ ) sebesar 0,978, dan *Flypaper Effect* ( $X_3$ ) sebesar 0,986. Dapat diketahui bahwa artinya, nilai *tolerance* dari masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,01. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas diantara variabel tersebut.

#### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya atau berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, karena jika terdapat heteroskedastisitas maka varian tidak konstan dapat menyebabkan biasanya standar error pada pengujian data yang dilakukan. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji hasil heteroskedastisitas metode glesjer.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glesjer

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	86,192	8,808		9,786	,000
	PAD	-,016	,026	-,085	-,613	,542
	SiLPA	,025	,018	,193	1,389	,171
	Flypaper Effect	,011	,023	,069	,497	,622

a. Dependent Variable: Abs\_RES

(Sumber: Output SPSS 25 data diolah peneliti, 2021)

Uji Heteroskodeastisitas dengan metode glesjer dapat dilihat pada tabel *Coefficient*. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila  $\text{Sig.} > 0.05$ . Berdasarkan Tabel 4.10 diatas diketahui bahwa nilai signifikasi ketiga variabel bebas lebih dari 0,05, yaitu Pendapatan Asli Daerah  $0,542 > 0,05$ , Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  $0,171 > 0,05$  dan *Flypaper Effect*  $0,622 > 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik adalah

model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) pada model regresi seperti ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 <sup>a</sup>	,405	,369	112,73565	1,935

a. Predictors: (Constant), Flypaper Effect, SiLPA, PAD

b. Dependent Variable: OPA

(Sumber: Output SPSS 25 data diolah peneliti, 2021)

Dari hasil uji autokorelasi di atas, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson, adalah sebesar 1,935. Nilai dU yang dilihat dari tabel DW dengan  $k = 3$  yang menunjukkan variabel independen dan  $n = 54$  yang menunjukkan banyaknya observasi, didapat bahwa nilai dU adalah 1,680. Selanjutnya berdasarkan tabel Durbin Watson,  $dU < d < (4 - dU)$  yaitu  $1,680 < 1,935 < 2,320$  ( $4 - 1,680$ ) dan nilai dW lebih kecil daripada ( $4 - dL$ ) yaitu 2,554 ( $4 - 1,446$ ). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan dalam penelitian ini.

### 4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect*. Sehingga persamaan model regresi berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	109,100	16,662		6,548	,000		
	PAD	,208	,050	,464	4,200	,000	,985	1,015
	SiLPA	,022	,034	,072	,654	,516	,993	1,007
	Flypaper Effect	,149	,044	,376	3,402	,001	,984	1,016

a. Dependent Variable: OPA

(Sumber: Output SPSS 25, data sekunder, diolah 2021)

$$Y = \alpha + \beta_{1x}X_1 + \beta_{2x}X_2 + \beta_{3x}X_3 + e$$

$$Y = 109,100 + 0,208 X_1 + 0,022 X_2 + 0,149 X_3 + e$$

Dimana:

- $Y$  = Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah  
 $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah  
 $\beta_2$  = Koefisien regresi untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
 $X_2$  = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi untuk *Flypaper Effect*  
 $X_3$  = *Flypaper Effect*  
 $e$  = Error

Interpretasi dari persamaan dari analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 109,100. Artinya, jika variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran dan *flypaper effect* adalah nol, maka nilai variabel dependen yaitu perilaku oportunistik penyusun anggaran nilainya positif yaitu sebesar 109,100.
2. Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Asli Daerah  
Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah bernilai positif, yaitu sebesar 0,208. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang searah dengan perilaku oportunistik penyusun anggaran. Setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan, maka perilaku oportunistik penyusun anggaran akan meningkat sebesar 0,208 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam regresi ini nilainya tetap.
3. Koefisien Regresi Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Nilai koefisien regresi variabel sisa lebih perhitungan anggaran bernilai positif, yaitu 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran memiliki hubungan yang searah dengan perilaku oportunistik penyusun anggaran. Setiap kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar satu satuan, maka perilaku oportunistik penyusun anggaran akan meningkat sebesar 0,022 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam regresi ini nilainya tetap.
4. Koefisien Regresi Variabel *Flypaper Effect*  
Nilai koefisien regresi variabel *flypaper effect* bernilai positif, yaitu 0,149. Hal ini menunjukkan bahwa *flypaper effect* memiliki hubungan yang searah dengan perilaku oportunistik penyusun anggaran. Setiap kenaikan artinya bahwa setiap kenaikan *flypaper effect* satu satuan, maka perilaku oportunistik

penyusun anggaran akan meningkat 0,149 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam regresi ini nilainya tetap.

### 4.3.3 Analisis Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis akan dilakukan pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), pengujian signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji-t).

#### 4.3.3.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara sampai dengan 1. Jika koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan jika koefisien determinasi mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,637 <sup>a</sup>	,405	,369	112, 73565

a. Predictors: (Constant), Flypaper Effect, SiLPA, PAD

b. Dependent Variabel: OPA

(Sumber: Output SPSS 25, data sekunder, diolah 2021)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa ( $R^2$ ) = 0,405 berarti hubungan antara PAD, SiLPA dan *Flypaper Effect* terhadap OPA sebesar 40,5%. *Adjusted R Square* sebesar 0,367 berarti bahwa 36,7% perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dijelaskan oleh faktor-faktor PAD, SiLPA dan *Flypaper Effect* sedangkan sisanya 59,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.3.3.4 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji signifikansi parsial (Uji t) dilakukan mengetahui apakah setiap variabel independen yaitu PAD, SiLPA dan *Flypaper Effect* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu OPA. Berikut ini adalah kriteria pengambilan keputusannya yaitu:

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.



Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji-t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	109,100	16,662		6,548	,000
	PAD	,208	,050	,464	4,200	,000
	SiLPA	,022	,034	,072	,654	,516
	Flypaper Effect	,149	,044	,376	3,402	,001

a. Dependent Variable: OPA

(Sumber : Output SPSS 25, data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.14, dari hasil hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t-hitung sebesar 4,200 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,676 ( $t\text{-hitung } 4,200 > t\text{-tabel } 1,676$ ) dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) secara signifikan mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memiliki nilai t-hitung sebesar 0,654 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,676 ( $t\text{-hitung } 0,654 > t\text{-tabel } 1,676$ ) dengan taraf signifikan sebesar 0,516 yang lebih besar dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau sebesar 0,05 ( $0,516 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( $X_2$ ) secara signifikan tidak mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 ditolak**, yang dapat dinyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel *Flypaper Effect* memiliki nilai t-hitung sebesar 3,402 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,676 ( $t\text{-hitung } 3,402 > t\text{-tabel } 1,676$ ) dengan taraf signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau sebesar 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* ( $X_3$ ) secara signifikan mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H3 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa *flypaper* berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

#### 4.3.3.3 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Uji signifikansi simultan (uji-F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu PAD, SiLPA, dan *Flypaper Effect* mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu OPA.

Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	376340,581	3	125446,860	11,055	,000 <sup>b</sup>
	Residual	567356,712	50	11347,134		
	Total	943697,294	53			

a. Dependent Variable: OPA

b. Predictor: (Constant), Flypaper Effect, SiLPA, PAD

(Sumber : Output SPSS 25, data sekunder, diolah 2021)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 11,055 dengan taraf signifikan sebesar  $0,000 < 0,005$  yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( $X_2$ ) dan *flypaper effect* ( $X_3$ ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran (Y).

#### 4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran (Y), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran (Y) dan *Flypaper Effect* ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran (Y). Berikut hasil pengujian hipotesis penelitian ini:

Tabel 4.16 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	H <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.	Diterima
2	H <sub>2</sub> : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Perilaku	Ditolak

	Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.	Oportunistik Penyusun Anggaran.	
3	H <sub>3</sub> : <i>Flypaper Effect</i> berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.	<i>Flypaper Effect</i> berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.	Diterima
4	H <sub>4</sub> : PAD, SiLPA dan <i>Flypaper Effect</i> berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.	PAD, SiLPA dan <i>Flypaper Effect</i> berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.	Diterima

(Sumber: data diolah peneliti, 2021)

#### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Hal ini terbukti melalui uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,208 artinya setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan akan meningkatkan perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil pengujian hipotesis t-hitung menunjukkan  $t_{hitung} (4,825) > t_{tabel} (1,672)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara signifikan mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut membuktikan bahwa **H1 diterima**, penelitian ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah menerima besaran atau kecilnya anggaran yang didapatkan pada daerah tersebut akan meningkatkan atau mendorong penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik. Dalam hal pengalokasian berkaitan dengan sumber pembiayaannya dari pendapatan, maka besaran pendapatan akan dimanfaatkan untuk mengatur alokasi belanja.

Dalam mengatur alokasi belanja, tidak selalu seluruh tambahan anggaran pendapatan yang didapat akan dialokasikan ke dalam belanja yang tepat. Dapat dikatakan pemerintah sebagai agen akan menyusun anggaran pendapatan dan mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk bidang-bidang tertentu sesuai preferensinya apabila terjadi peningkatan jumlah PAD. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya dalam anggaran dengan cara merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang mendukung kepentingannya yang dapat berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat secara langsung.

Hasil pengujian pada penelitian ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh (Mahendra, 2017) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran dan

dijelaskan bahwa Pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Alasan lainnya mengapa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh pada perilaku oportunistik adalah penggunaan Pendapatan Asli Daerah yang telah diatur dalam PP 37/2006 dan PP 21/2007 yang mengaitkan belanja penunjang operasional legislatif dengan besaran Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.4.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Hal ini tidak terbukti dengan hasil uji regresi berganda yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,022 artinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dapat mempengaruhi berperilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil pengujian hipotesis t-hitung menunjukkan  $t_{hitung} (0,654) < t_{tabel} (1,676)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,516 yang berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara signifikan tidak mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut membuktikan bahwa **H2 ditolak**, dapat dinyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa besaran atau kecilnya SiLPA dari anggaran sebelumnya, tidak akan mempengaruhi atau mendorong penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik penyusun anggaran.

Dalam penyusunannya sesuai dengan dibuatkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang bermaksud untuk memberikan kepastian peraturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, salah satunya yaitu kebijakan akuntansi SiLPA yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pembiayaan neto, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dapat diketahui setelah Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun sebelumnya disahkan. Oleh sebab itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak termasuk kedalam sumber penerimaan pemerintah daerah yang dapat diperuntukkan bagi belanja infrastruktur, pengadaan aset atau melaksanakan kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat secara langsung. SiLPA bisa dimanfaatkan dalam membiayai

program lanjutan atas beban belanja langsung dan membiayai tanggungjawab lainnya sampai masa akhir anggaran yang belum sempat terselesaikan secara utuh. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dialokasikan kembali untuk kegiatan belanja langsung pada tahun berikutnya, sehingga penyusun anggaran tidak dapat menekan atau mempengaruhi untuk menaikkan anggaran pada SiLPA dan memiliki peluang bagi para penyusun anggaran dalam melakukan perilaku oportunistik melalui SiLPA.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian (Sucahya, 2016) bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam struktur SiLPA terdapat dana perimbangan sudah dialokasikan untuk kegiatan dari transfer pusat atau dana perimbangan yang terikat sehingga tidak dapat digunakan selain kegiatan yang telah ditetapkan dengan petunjuk teknis penggunaan dana perimbangan tersebut. SiLPA juga terdapat kegiatan belanja yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, sehingga penyusun anggaran tidak dapat menekan atau mempengaruhi untuk menaikkan anggaran perubahan SiLPA.

#### **4.4.3 Pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Hal ini terbukti melalui uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,022 artinya *flypaper effect* dapat mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil pengujian hipotesis t-hitung menunjukkan  $t_{hitung} (3,402) > t_{tabel} (1,676)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Flypaper Effect* secara signifikan mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut membuktikan bahwa **H3 diterima**, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya fenomena ekonomi dimana, ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten yang tinggi terhadap dana bantuan berupa transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Ketergantungan ini terlihat (jelas) dari aspek keuangan yaitu alokasi transfer berupa DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lebih tinggi dan kurangnya memperhatikan kemampuan daerah sendiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya yaitu berupa PAD. Akibatnya pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat, dari hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan pemerintah daerah lebih (merespon) belanja lebih banyak (lebih boros) dengan mengandalkan dana transfer atau DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan memaksimalkan kapasitas fiskal daerahnya dengan menggunakan kemampuan daerah itu sendiri yang berasal dari PAD. Dengan demikian, terjadinya *flypaper effect* didukung juga dengan adanya adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini

melakukan pengeluaran yang berlebih dan berusaha untuk memaksimalkan anggaran serta menyarankan anggaran agar lebih meningkatkan anggaran, dengan alasan melakukan hal tersebut akan membuat mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di masyarakat dengan ikut terlibat atau berperan dalam proses penyusunan anggaran yang memberikan celah untuk berperilaku oportunistik.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian dari (Mahendra, 2017) bahwa *flypaper effect* berpengaruh yang menemukan bahwa variabel *flypaper effect* tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Megasari, 2015) yang menyatakan *flypaper effect* berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri.

#### **4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, hasil pengujian hipotesis f-hitung sebesar 11,055 dengan taraf signifikan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* mempengaruhi Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut membuktikan bahwa **H4 diterima**, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penganggaran atau menyusun anggaran dalam pengalokasian pembiayaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh penyusun anggaran bisa terjadi adanya penyalahgunaan anggaran, dalam melakukannya tidak hanya terfokus pada satu anggaran tetapi bisa lebih dalam melakukan oportunistik.

Dapat dijelaskan sebagaimana tujuannya melalui proses perencanaan dan penyusunan APBD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Adanya pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya yang terdiri dari dua komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, adanya peningkatan dalam anggaran PAD yang didapatkan dalam daerahnya menimbulkan ketimpangan dalam proses penyusunan anggaran untuk pengalokasian anggaran pemerintah yaitu adanya misalokasi dalam rangka untuk mendukung pemenuhan kepentingannya. Permasalahan lain dalam

pengalokasian anggaran yaitu tidak diperhatikannya tempo waktu ditetapkan dalam perubahan APBD. Hal ini menjadikan anggaran menjadi tidak efektif atau bahkan tidak terealisasi sesuai dengan tujuan awal pada proses perancangan anggaran. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terbentuknya SiLPA yang tinggi. Dalam mengurangi ketimpangan permasalahan pada anggaran, maka pemerintah pusat memberikan bantuan dengan mengeluarkan dan transfer berupa DAU dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, tetapi hal tersebut malah memicu permasalahan baru yaitu adanya *flypaper effect* suatu kondisi ekonomi yang terjadi karena pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer yang dapat mengakibatkan adanya perubahan pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan (RAPBD) yang dapat membuka peluang untuk melakukan oportunistik dengan memaksimalkan utilitasnya dengan mengalokasikan anggaran kepada kegiatan atau proyek-proyek yang dapat menguntungkan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan (Mahendra, 2017) bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran dan *flypaper effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran dan (Parwati dkk, 2015) bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019). Dengan menggunakan tiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect*. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas dibab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada Uji t (parsial) yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,200 > 1,676$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya, tingginya pendapatan yang di dapat dari PAD yang selalu bertambah, maka akan mendorong semakin tinggi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hal ini sesuai dengan  $H_1$  yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada Uji t (parsial) yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,654 < 1,676$ ) dan nilai signifikansi  $0,516 > 0,05$ . Artinya, tingginya SiLPA bisa dimanfaatkan dalam membiayai program lanjutan atas beban belanja langsung dan membiayai tanggungjawab lainnya sampai masa akhir anggaran yang belum sempat terselesaikan secara utuh dan jumlah SiLPA akan dialokasikan kembali untuk kegiatan belanja langsung pada tahun berikutnya, sehingga penyusun anggaran tidak dapat menekan atau mempengaruhi untuk menaikan anggaran pada SiLPA dan memberi peluang bagi para penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik melalui SiLPA. Hal ini tidak sesuai dengan  $H_2$  yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.
3. *Flypaper Effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada Uji t (parsial) yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,402 > 1,676$ ) dan nilai signifikansi  $0,001 <$



0,05. Artinya, semakin tinggi jumlah *flypaper effect* yang terjadi pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, maka akan menyebabkan Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran semakin tinggi. Karena pemerintah daerah dalam merespon bantuan dana transfer yang diberilakan oleh pemerintah pusat lebih banyak (boros) dibandingkan dengan menggunakan PAD dari daerah itu sendiri, sehingga mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah serta pengeluaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan  $H_3$  yang menyatakan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

4. Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hal ini ditunjukkan dari hasil Uji F (simultan) yang menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} 11,055 > F_{tabel} 2,79$  dan dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana *R Square* sebesar 40,5%, sedangkan sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini. Artinya, bahwa dalam melakukan tindakan perilaku oportunistik penyusun anggaran ini dapat dilakukan secara bersama-sama tidak hanya dilakukan satu variabel saja baik itu dari anggaran PAD, SiLPA sampai terjadinya *flypaper effect*. Hal ini sesuai dengan  $H_4$  yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

## 5.2 Saran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Daerah
  - a. Diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dan juga dapat memberikan pelayanan publik yang baik pada daerah itu sendiri.
  - b. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan tujuan sesungguhnya dalam penyusunan anggaran dengan benar-benar mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum serta meningkatkan pengawasan atas pengelolaan anggaran dari awal proses penganggaran.
  - c. Pada saat penyusunan anggaran agar dilakukan secara cermat sehingga pada saat realisasi anggaran dana dapat terserap seoptimal mungkin sehingga dimungkinkan SiLPA yang rendah.

- d. Untuk memperkecil probabilitas perilaku oportunistik kedepannya, sebaiknya penetapan pos anggaran PAD perlu menggunakan metode analisa perhitungan potensi PAD yang terukur, sehingga hasilnya dapat memenuhi anggaran belanja sesuai dengan prinsip anggaran berimbang, tidak hanya sekedar menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
    - a. Memperbesar sampel penelitian dengan cara menambah periode penelitian dan wilayah penelitian, sehingga variasi data antar-tahun pada suatu wilayah dapat terlihat dan lebih luas cangkupan penelitiannya.
    - b. Faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel bebas yaitu PAD, SiLPA dan *Flypaper Effect* sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran.
    - c. Dapat mengembangkan proksi dari perilaku oportunistik penyusun anggaran. Pengukuran lain dapat digunakan mengingat pengukuran perilaku merupakan suatu yang bersifat multidimensi dan mengingat bahwa pengukuran proksi dalam penelitian ini masih bersifat umum, sementara masih banyak belanja modal, belanja hibah dan bantuan sosial dapat dijabarkan menjadi jenis belanja sesuai dengan fungsinya sehingga nantinya dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2:53–64.
- Abdullah. 2004. "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Pricipal-Agent Theory." *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1):1–22.
- Abdullah Dan Asmara. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah." *Simponium Nasional Akuntansi 9 Padang* 23–26.
- Adiputra, Pradana. 2014. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 3(2):1–30.
- Ayu Suartini Dkk. 2016. "Determinan Perilaku Opportunistic Penyusun Anggaran Calon Incumbent Terkait Pilkada Serentak Tahun 2015 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8:2639–64.
- Bastian, Indra. 2014. "Lingkup Akuntansi Sektor Publik." 1–52.
- Biduri, Sarwenda. 2018. "Akuntansi Sektor Publik." 1–196.
- Eisenhardt. 1989. "Agency Theory : An Assessment And Review Linked References Are Available On Jstor For This Article : Agency Theory : An Assessment And Review." *Academy Of Management* 14(1):57–74.
- Jensen, C., And H. Meckling. 1976. "Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction And Summary In This Paper Wc Draw On Recent Progress In The Theory Of ( 1 ) Property Rights , Firm . In Addition To Tying Together Elements Of The Theory Of E." *Journal Of Financial Economics* 3:305–60.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/penmprovjabar/14/09/08/nkbn4n-korupsi-dana-pendidikan-anggota-dprd-bandungditanan>. [Diakses 3 Desember 2020]
- <https://nasional.tempo.co/read/711407/kepaladinas-pendidikan-jawa-barat-diduga-korupsi>. [Diakses 3 Desember 2020]
- <https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017>. [Diakses pada tanggal 17 Desember 2020].
- <https://www.jabarprov.go.id>
- <https://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series> [Diakses pada tanggal 5 April 2021]
- Jensen, C., and H. Meckling. 1976. "Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and Summary In This Paper WC Draw on Recent Progress in the Theory of (1) Property Rights , Firm

- In Addition to Tying Together Elements of the Theory of E.” *Journal of Financial Economics* 3:305–60.
- Kamaliah, Edfan Darlis, Dan Viorita Virsanita. Kampus Bina Widya Pekan Baru. 2010. “Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 2 Juni 2010.” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 18(2):50–62.
- Kuncoro. 2007. “Flypaper Effect : Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2002-2013.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 12:1–16.
- Krenn, C. 2017. The European Court of Justice’s Financial Accountability. *European Constitutional Law Review*, 13(3), 453–474.
- Latifah. 2010. “Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi *Agency Theory* Di Sektor Publik ? *Is There Of Opportunistic Behavior On The Agency Theory Application.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 5(2):85–94.
- Mahendra, Agil Salman. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran, Dan Flypaper Effect Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2013-2014).” 1–15.
- Megasari, Ida Ayu Gede Sutha. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.” *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 20(2):130–37.
- Muslimah, Gita. 2020. “Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dbh Dan Silpa Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan 1.” 89–99.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik Penerbit ANDI.
- Parwati, S.M., Budiasih, I.G.A.N & Astika, I.B.P. 2015. “Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 127–33. Universitas Udayana
- Republik Indonesia, 2014. *Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.*
- Riky Maryono. 2013. “Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah.” 1–19.

- Sucahya, Yahya. 2016. "Peluang Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Perubahan Pada Pemerintah Kabupaten Sintang."
- Tia, Megah Dheane. 2018. "Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah Dan Perubahan Silpa Terhadap Perilaku Oportunistik Eksekutif Penyusun Anggaran (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia)."
- Wilantika, Cangga. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Pada Daerah Pemekaran Se-Sumeta Bagian Selatan 2013-2017)." 1-68.
- Yusuf Jaya Saputra, Rosnawintang, Nasrulla Dali. 2020. "Pengaruh Dau, Jenis Dan Letak Pemerintahan Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara." *Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep)* 5(1):58-70.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira  
Alamat : Ciherang Inpres, Rt 01/06, Kecamatan Dramaga,  
Kelurahan Ciherang, Kabupaten Bogor. Pos 16680  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 9 Agustus 1999  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan

- TK : Nurul Ihya Kota Bogor
- SD : SD Negeri Margajaya 2
- SMP : SMP Negeri 14 Bogor
- SMA : SMAIT Plus Bina Bangsa Sejahtera
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 15 Juli 2021

Penulis

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

**DATA ANGGARAN BELANJA SEKTOR PENDIDIKAN KABUPATEN  
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 – 2019**

No	Kabupaten	Dalam triliun rupiah				Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ ) Anggaran		
		TA.2016	TA.2017	TA.2018	TA.2019	TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	1.982.716.181.662	2.279.145.991.823	2.455.040.344.107	2.533.558.212.726	296.429.810.161	175.894.352.284	78.517.868.619
2.	Kab. Sukabumi	1.077.852.180.249	1.207.560.950.830	1.235.619.886.570	1.255.216.308.110	129.708.770.581	28.058.935.740	19.596.421.540
3.	Kab. Cianjur	1.212.507.700.227	1.353.564.724.785	1.429.066.165.839	1.293.829.453.788	141.057.024.558	75.501.441.054	(135.236.712.051)
4.	Kab. Bandung	1.925.159.302.327	2.003.183.300.438	1.974.281.191.336	2.031.755.764.631	78.023.998.111	(28.902.109.102)	57.474.573.295
5.	Kab. Garut	1.387.064.041.294	1.715.124.990.022	1.583.786.717.431	1.665.608.992.008	328.060.948.728	(131.338.272.591)	81.822.274.577
6.	Kab. Tasikmalaya	1.231.059.600.443	1.310.695.582.732	1.452.420.041.282	1.557.249.292.097	79.635.982.289	141.724.458.550	104.829.250.815
7.	Kab. Ciamis	932.625.512.932	962.159.086.019	981.251.062.345	1.010.261.714.419	29.533.573.087	19.091.976.326	29.010.652.074
8.	Kab. Kuningan	963.503.544.053	991.174.340.586	1.001.250.208.020	1.100.316.095.614	27.670.796.533	10.075.867.434	99.065.887.594
9.	Kab. Cirebon	1.236.404.714.961	1.337.988.859.904	1.295.250.637.912	1.435.421.191.374	101.584.144.943	(42.738.221.992)	140.170.553.462
10.	Kab. Majalengka	921.870.836.757	153.657.245.472	431.539.158.490	571.802.247.555	(768.213.591.285)	277.881.913.018	140.263.089.065
11.	Kab. Sumedang	1.003.124.192.168	985.669.605.333	1.116.765.572.470	1.266.576.804.466	(17.454.586.835)	131.095.967.137	149.811.231.996
12.	Kab. Indramayu	1.055.419.863.645	1.059.391.902.319	1.002.428.803.592	1.082.639.061.919	3.972.038.674	(56.963.098.727)	80.210.258.327
13.	Kab. Subang	40.519.593.477	1.110.419.167.398	940.265.784.557	1.067.100.720.535	1.069.899.573.921	(170.153.382.841)	126.834.935.978
14.	Kab. Purwakarta	605.721.634.180	80.264.102.006	691.809.037.753	744.352.147.828	(525.457.532.174)	611.544.935.747	52.543.110.075



15.	Kab. Karawang	1.138.479.024.479	1.245.966.620.449	1.269.913.336.697	1.387.556.812.968	107.487.595.970	23.946.716.248	117.643.476.271
16.	Kab. Bekasi	1.439.628.840.925	1.627.142.848.072	1.611.888.564.516	1.775.381.712.895	187.514.007.147	(15.254.283.556)	163.493.148.379
17.	Kab. Bandung Barat	881.610.972.870	993.595.120.178	922.457.563.805	1.024.604.488.986	111.984.147.308	(71.137.556.373)	102.146.925.181
18.	Kab. Pangandaran	348.712.838.086	523.070.703.072	370.294.928.738	396.914.268.712	174.357.864.986	(152.775.774.334)	26.619.339.974

## Lampiran 2

**DATA ANGGARAN BELANJA SEKTOR KESEHATAN KABUPATEN  
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 – 2019**

No	Kabupaten	Dalam triliun rupiah				Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA.2016	TA.2017	TA.2018	TA.2019	TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	1.167.687.611.477	1.287.368.398.368	1.288.938.799.884	1.487.674.392.439	119.680.786.891	1.570.401.516	198.735.592.555
2.	Kab. Sukabumi	737.924.310.046	631.290.541.778	707.200.995.865	752.937.185.546	(106.633.768.268)	75.910.454.087	45.736.189.681
3.	Kab. Cianjur	692.329.911.360	683.460.379.256	747.247.238.723	796.079.609.499	(8.869.532.104)	63.786.859.467	48.832.370.776
4.	Kab. Bandung	726.180.521.722	715.690.223.513	738.014.371.715	958.232.945.311	(10.490.298.209)	22.324.148.202	220.218.573.596
5.	Kab. Garut	575.953.307.009	510.920.786.870	518.523.238.530	660.224.386.054	(65.032.520.139)	7.602.451.660	141.701.147.524
6.	Kab. Tasikmalaya	367.139.679.720	324.721.690.825	328.308.326.698	431.764.423.333	(42.417.988.895)	3.586.635.873	103.456.096.635
7.	Kab. Ciamis	359.669.932.046	383.118.749.176	416.064.346.562	428.292.628.318	23.448.817.130	32.945.597.386	12.228.281.756
8.	Kab. Kuningan	325.255.596.161	369.532.175.623	377.190.735.749	409.292.527.272	44.276.579.462	7.658.560.126	32.101.791.523
9.	Kab. Cirebon	620.753.641.615	639.700.400.813	708.866.584.115	832.935.550.107	18.946.759.198	69.166.183.302	124.068.965.991
10.	Kab. Majalengka	421.144.249.953	284.853.148.247	418.243.863.034	423.044.690.572	(136.291.101.706)	133.390.714.787	4.800.827.538
11.	Kab. Sumedang	355.895.295.333	436.632.914.167	475.370.055.988	483.288.357.659	80.737.618.834	38.737.141.821	7.918.301.670
12.	Kab. Indramayu	501.695.609.303	583.445.871.397	677.537.625.110	690.129.757.270	81.750.262.094	94.091.753.713	12.592.132.160
13.	Kab. Subang	1.181.236.532	375.033.558.549	311.788.972.535	445.786.878.667	373.852.322.017	(63.244.586.014)	133.997.906.132
14.	Kab. Purwakarta	234.340.736.960	43.369.912.691	290.128.987.282	345.606.148.647	(190.970.824.269)	246.759.074.591	55.477.161.365

15.	Kab. Karawang	554.748.693.803	572.244.480.705	654.698.317.612	781.677.806.944	17.495.786.902	82.453.836.907	126.979.489.332
16.	Kab. Bekasi	323.102.367.409	746.403.443.177	1.087.040.200.275	1.600.700.502.081	423.301.075.768	340.636.757.098	513.660.301.806
17.	Kab. Bandung Barat	295.329.416.714	355.092.799.628	295.727.757.625	340.594.454.811	59.763.382.914	(59.365.042.003)	44.866.697.186
18.	Kab. Pangandaran	86.735.507.682	169.164.865.075	183.253.418.265	361.657.594.774	82.429.357.394	14.088.553.190	178.404.176.509

## Lampiran 3

**DATA ANGGARAN BELANJA SEKTOR PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 – 2019**

No	Kabupaten/Kota	Dalam triliun rupiah				Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA.2016	TA.2017	TA.2018	TA.2019	TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	1.775.397.814.397	1.925.279.838.566	2.194.431.144.348	2.059.183.054.698	149.882.024.169	(269.151.305.782)	(135.248.089.650)
2.	Kab. Sukabumi	809.737.028.290	984.232.106.761	1.063.139.750.689	1.202.127.298.338	174.495.078.471	78.907.643.928	138.987.547.649
3.	Kab. Cianjur	840.358.178.053	864.942.279.860	952.376.875.128	1.022.932.827.993	24.584.101.807	87.434.595.268	70.555.952.865
4.	Kab. Bandung	918.878.947.596	991.981.194.841	1.066.399.016.251	1.281.799.759.222	73.102.247.245	74.417.821.410	215.400.742.971
5.	Kab. Garut	727.784.990.263	1.027.257.133.360	1.185.799.349.305	1.275.918.124.595	299.472.143.097	158.542.215.945	90.118.775.290
6.	Kab. Tasikmalaya	899.772.354.204	1.024.422.754.658	991.518.751.412	1.097.418.917.555	124.650.400.454	(32.904.003.246)	105.900.166.143
7.	Kab. Ciamis	636.048.116.035	747.985.783.401	739.503.895.579	729.913.933.086	111.937.667.366	(8.481.887.822)	(9.589.962.493)
8.	Kab. Kuningan	686.583.645.280	722.991.095.816	714.850.965.911	761.827.002.685	36.407.450.536	(8.140.129.905)	46.976.036.774
9.	Kab. Cirebon	756.220.359.684	884.474.805.972	955.946.713.424	1.060.829.697.960	128.254.446.288	71.471.907.452	104.882.984.536
10.	Kab. Majalengka	538.749.027.318	947.720.385.119	1.044.526.471.515	2.200.315.552.304	408.971.357.801	96.806.086.396	1.155.789.080.789
11.	Kab. Sumedang	545.279.544.619	681.277.440.005	695.444.792.586	773.724.639.754	135.997.895.386	14.167.352.581	78.279.847.168
12.	Kab. Indramayu	640.380.680.647	787.088.308.021	825.683.381.847	997.248.926.818	146.707.627.374	38.595.073.826	171.565.544.971
13.	Kab. Subang	81.970.486.771	1.281.857.267.294	1.093.509.778.494	1.311.776.385.679	1.199.886.780.523	(188.347.488.800)	218.266.607.185
14.	Kab. Purwakarta	559.695.673.567	40.547.527.720	631.550.177.853	752.799.279.106	(519.148.145.847)	591.002.650.133	121.249.101.253

15.	Kab. Karawang	817.547.121.953	912.911.492.725	1.020.417.087.012	1.234.860.396.202	95.364.370.772	107.505.594.287	214.443.309.190
16.	Kab. Bekasi	387.911.376.722	791.788.135.782	843.985.139.409	933.472.385.072	403.876.759.060	52.197.003.627	89.487.245.663
17.	Kab. Bandung Barat	634.628.191.738	774.539.042.441	897.708.444.201	962.476.625.447	139.910.850.703	123.169.401.760	64.768.181.246
18.	Kab. Pangandaran	266.067.287.072	579.955.761.944	325.172.255.296	372.816.425.912	313.888.474.872	(254.783.506.648)	47.644.170.616

## Lampiran 4

**DATA VARIABEL PENELITIAN**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN**  
**DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 – 2019**

No	Kabupaten	Dalam triliun rupiah				Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ ) Anggaran		
		TA.2016	TA.2017	TA.2018	TA.2019	TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	2.292.178.638.051	3.041.872.447.905	2.794.660.740.152	3.161.165.915.498	749.693.809.854	(247.211.707.753)	366.505.175.346
2.	Kab. Sukabumi	548.936.246.392	799.499.855.484	565.369.086.733	619.788.612.706	250.563.609.092	(234.130.768.751)	54.419.525.973
3.	Kab. Cianjur	455.156.491.161	535.232.527.172	569.844.590.576	628.558.761.864	80.076.036.011	34.612.063.404	58.714.171.288
4.	Kab. Bandung	856.514.601.823	936.905.730.680	927.543.321.132	1.025.354.252.358	80.391.128.857	(9.362.409.548)	97.810.931.225
5.	Kab. Garut	385.312.442.433	692.255.365.083	421.299.024.535	486.565.326.730	306.942.922.650	(270.956.340.548)	65.266.302.195
6.	Kab. Tasikmalaya	216.226.994.099	401.502.016.966	248.420.386.329	288.290.693.896	185.275.022.867	(153.081.630.637)	39.870.307.567
7.	Kab. Ciamis	204.759.820.709	223.076.019.909	234.610.670.215	264.280.368.264	18.316.199.200	11.534.650.306	29.669.698.049
8.	Kab. Kuningan	253.441.395.870	384.398.431.333	303.218.052.848	301.403.914.672	130.957.035.463	(81.180.378.485)	(1.814.138.176)
9.	Kab. Cirebon	529.050.148.252	779.337.852.278	584.810.843.482	639.841.341.358	250.287.704.026	(194.527.008.796)	55.030.497.877
10.	Kab. Majalengka	331.527.312.738	513.783.842.022	449.974.129.889	439.843.264.595	182.256.529.284	(63.809.712.133)	(10.130.865.294)
11.	Kab. Sumedang	345.804.901.984	553.257.332.797	432.181.933.419	463.528.449.322	207.452.430.813	121.075.399.378	31.346.515.903
12.	Kab. Indramayu	351.176.916.498	577.594.379.049	419.892.815.093	450.063.256.102	226.417.462.551	(157.701.563.956)	30.170.441.009
13.	Kab. Subang	360.621.832.907	581.282.665.118	400.755.045.571	463.310.453.325	220.660.832.211	(180.527.619.547)	62.555.407.754
14.	Kab. Purwakarta	341.116.143.869	472.480.560.978	368.851.052.594	420.353.733.502	131.364.417.109	(103.629.508.384)	51.502.680.908

15.	Kab. Karawang	1.003.391.572.098	1.398.309.963.116	1.169.569.261.196	1.356.319.882.910	394.918.391.018	(228.740.701.920)	186.750.621.714
16.	Kab. Bekasi	1.917.814.908.833	2.311.805.849.243	2.094.369.342.687	2.439.368.558.406	393.990.940.410	(217.436.506.556)	344.999.215.719
17.	Kab. Bandung Barat	376.221.149.262	609.916.387.808	422.341.026.545	528.087.033.271	233.695.238.546	187.575.361.263	105.746.006.726
18.	Kab. Pangandaran	66.385.348.153	83.591.302.088	111.217.120.145	114.813.035.209	17.205.953.935	27.625.818.057	3.595.915.064

## Lampiran 5

**DATA VARIABEL PENELITIAN**  
**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) KABUPATEN**  
**DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 – 2019**

No	Kabupaten/Kota	Dalam triliun rupiah				Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ )		
		TA.2016	TA.2017	TA.2018	TA.2019	TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	692.815.793.144	685.197.888.082	864.364.143.135	1.105.295.799.164	(7.617.905.062)	179.166.255.053	240.931.656.029
2.	Kab. Sukabumi	227.869.347.465	330.601.314.546	338.601.354.546	217.220.035.706	102.731.967.081	8.000.040.000	(121.381.318.840)
3.	Kab. Cianjur	100.201.138.207	199.349.586.043	209.495.791.464	287.109.752.033	99.148.447.837	10.146.205.421	77.613.960.569
4.	Kab. Bandung	488.056.779.022	648.406.452.832	709.425.571.231	636.923.198.548	160.349.673.810	61.019.118.399	(72.502.372.683)
5.	Kab. Garut	132.643.759.482	175.208.698.352	210.033.883.504	329.272.404.224	42.564.938.870	34.825.185.152	119.238.520.720
6.	Kab. Tasikmalaya	190.632.111.015	86.426.653.779	177.939.417.154	215.110.501.718	(104.205.457.236)	91.512.763.375	37.171.084.564
7.	Kab. Ciamis	16.322.587.947	102.948.945.487	7.121.270.115	245.707.413.261	86.626.357.540	74.990.471.667	37.171.084.564
8.	Kab. Kuningan	8.645.264.190	47.311.037.288	34.423.696.301	54.604.199.504	38.665.773.099	(40.189.767.173)	238.586.143.146
9.	Kab. Cirebon	60.052.323.425	38.647.699.580	300.058.084.653	288.834.428.356	(21.404.623.845)	(4.224.003.279)	20.180.503.203
10.	Kab. Majalengka	119.337.933.962	163.962.435.690	159.116.192.126	101.422.222.057	44.624.501.728	(4.846.243.563)	(57.693.970.069)
11.	Kab. Sumedang	388.899.824.822	303.997.858.138	109.359.289.590	112.930.843.943	(84.901.966.685)	86.837.477.158	3.571.554.353
12.	Kab. Indramayu	156.099.506.859	22.521.812.432	13.915.485.082	79.707.865.597	(133.577.694.428)	(36.251.685.812)	65.792.380.515
13.	Kab. Subang	13.916.459.082	50.167.170.894	10.207.423.917	27.191.753.073	36.250.711.812	(117.035.696.388)	16.984.329.156
14.	Kab. Purwakarta	226.428.595.794	127.243.120.305	155.345.891.688	38.710.364.327	(99.185.475.489)	(141.731.357.897)	17.416.490.860



15.	Kab. Karawang	315.160.718.100	310.625.828.414	168.894.470.517	186.310.961.377	(4.534.889.686)	722.686.796.304	124.958.209.839
16.	Kab. Bekasi	587.746.870.030	306.532.367.875	1.029.219.164.179	1.154.177.374.018	(281.214.502.155)	(31.939.644.337)	(38.151.525.333)
17.	Kab. Bandung Barat	167.209.075.126	304.002.913.177	272.063.268.840	233.911.743.507	136.793.838.051	(31.939.644.337)	(38.151.525.333)
18.	Kab. Pangandaran	71.021.207.850	28.954.110.718	3.811.288.680	16.043.940.289	(42.067.097.131)	(25.142.822.038)	12.232.651.609

## Lampiran 6

**DATA VARIABEL PENELITIAN**  
**FLYPAPER EFFECT DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN**  
**DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 – 2019**

No	Kabupaten/Kota	Dalam triliun rupiah				Setelah Perhitungan <i>Spread</i> ( $\Delta$ ) Anggaran		
		TA.2016	TA.2017	TA.2018	TA.2019	TA (2017) - (2016)	TA (2018) - (2017)	TA (2019) - (2018)
1.	Kab. Bogor	1.917.780.234.000	1.902.004.175.000	1.919.023.527.000	2.034.853.421.000	(15.776.059.000)	17.019.352.000	115.829.894.000
2.	Kab. Sukabumi	1.595.760.000.000	1.575.410.205.000	1.580.414.660.000	1.654.343.840.000	(20.349.795.000)	5.004.455.000	73.929.180.000
3.	Kab. Cianjur	1.569.946.984.000	1.542.820.697.000	1.548.376.287.000	1.627.020.432.000	(27.126.287.000)	5.555.590.000	78.644.145.000
4.	Kab. Bandung	2.096.680.000.000	2.059.845.225.000	2.060.202.697.000	2.149.817.107.000	(36.834.775.000)	357.472.000	89.614.410.000
5.	Kab. Garut	1.808.710.000.000	1.776.936.655.000	1.806.936.655.000	1.837.050.436.000	(31.773.345.000)	30.000.000.000	30.113.781.000
6.	Kab. Tasikmalaya	1.467.970.000.000	1.442.184.968.000	1.451.247.063.000	1.508.324.968.000	(25.785.032.000)	9.062.095.000	57.077.905.000
7.	Kab. Ciamis	1.203.480.000.000	1.182.335.044.000	1.156.616.512.412	1.212.593.846.191	(21.144.956.000)	(25.718.531.588)	55.977.333.779
8.	Kab. Kuningan	1.218.601.913.000	1.197.194.996.000	1.200.194.996.000	1.243.359.240.000	(21.406.917.000)	3.000.000.000	43.164.244.000
9.	Kab. Cirebon	1.521.877.112.000	1.495.142.625.000	1.500.538.688.000	1.591.291.632.000	(26.734.487.000)	5.396.063.000	90.752.944.000
10.	Kab. Majalengka	1.182.861.476.000	1.204.397.174.000	1.170.272.587.360	1.167.367.009.900	21.535.698.000	(34.124.586.640)	(2.905.577.460)
11.	Kab. Sumedang	1.138.930.000.000	1.119.198.604.000	1.125.798.410.000	1.180.828.452.000	(19.731.396.000)	6.599.806.000	55.030.042.000
12.	Kab. Indramayu	1.393.868.530.000	1.369.382.742.000	1.371.769.951.000	1.418.027.397.000	(24.485.788.000)	2.387.209.000	46.257.446.000
13.	Kab. Subang	1.305.620.000.000	1.282.683.362.000	1.282.509.399.625	1.323.634.343.000	(22.936.638.000)	(173.962.375)	41.124.943.375
14.	Kab. Purwakarta	857.566.481.000	850.277.151.000	854.419.670.000	889.747.462.000	(7.289.330.000)	4.142.519.000	35.327.792.000

15	Kab. Karawang	1.250.730.000.000	1.239.740.020.000	1.306.925.470.000	1.316.030.802.000	(10.989.980.000)	67.185.450.000	9.105.332.000
16	Kab. Bekasi	1.173.510.000.000	1.152.893.281.000	1.653.956.354.000	1.219.550.987.000	(20.616.719.000)	501.063.073.000	(434.405.367.000)
17	Kab. Bandung Barat	1.138.930.000.000	1.119.198.604.000	1.125.798.410.000	1.180.828.452.000	(19.731.396.000)	6.599.806.000	55.030.042.000
18	Kab. Pangandaran	564.731.125.000	538.882.193.000	538.351.892.000	568.022.063.000	(25.848.932.000)	(530.301.000)	29.670.171.000

## Lampiran 7

**DATA VARIABEL PENELITIAN**  
**PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN (OPA)**

(Dalam triliun rupiah)

No	Kabupaten	OPA		
		2017-2016	2018-2017	2019-2018
1	Kab. Bogor	565.992.621.221	446.616.059.582	142.005.371.524
2	Kab. Sukabumi	197.570.080.784	182.877.033.755	204.320.158.870
3	Kab. Cianjur	156.771.594.261	226.722.895.789	-15.848.388.410
4	Kab. Bandung	140.635.947.147	67.839.860.510	493.093.889.862
5	Kab. Garut	562.500.571.686	34.806.395.014	313.642.197.391
6	Kab. Tasikmalaya	161.868.393.848	112.407.091.177	314.185.513.593
7	Kab. Ciamis	164.920.057.583	43.555.685.890	31.648.971.337
8	Kab. Kuningan	108.354.826.531	9.594.297.655	178.143.715.891
9	Kab. Cirebon	248.785.350.429	97.899.868.762	369.122.503.989
10	Kab. Majalengka	-495.533.335.190	508.078.714.201	1.300.852.997.392
11	Kab. Sumedang	199.280.927.385	184.000.461.539	236.009.380.834
12	Kab. Indramayu	232.429.928.142	75.723.728.812	264.367.935.458
13	Kab. Subang	2.643.638.676.461	-421.745.457.655	479.099.449.295
14	Kab. Purwakarta	-1.235.576.502.290	1.449.306.660.471	229.269.372.693
15	Kab. Karawang	220.347.753.644	213.906.147.442	459.066.274.793
16	Kab. Bekasi	265.359.604.674	168.000.260.700	87.559.592.315
17	Kab. Bandung Barat	311.658.380.925	-7.333.196.616	211.781.803.613
18	Kab. Pangandaran	570.675.697.252	-393.470.727.792	252.667.687.099